



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

SEJARAH KOTA DUMAI 1979-2005

SKRIPSI



**RINI MULIYA SARI
03181028**

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul **"Sejarah Kota Dumai 1979-2005"**. Pemilihan tahun 1979 untuk melihat perkembangan Kota Dumai sejak diresmikannya sebagai Kota administratif sampai menjadi pemerintahan kota (1999), karena pada tahun inilah dimulainya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat tentang otonomi daerah, sehingga melahirkan tuntutan guna menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan daerah, yang berimbas pada perubahan status Pemerintahan Dumai dari kota administratif menjadi kota. Tahun 2005 diambil sebagai batasan akhir karena penulisan ini memfokuskan pada perkembangan Dumai pada masa kepemimpinan H. Wan Syamsir Yus. Sungguhpun demikian, penulisan Kota Dumai ini juga melihat periode sebelumnya. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yaitu pencarian dan pengumpulan sumber dan bahan (*heuristik*), pengujian dan analisa terhadap sumber yang digunakan (*kritik*), *interpretasi*, dan penulisan (*historiografi*). Dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber primer, yang diperoleh melalui studi kearsipan dan wawancara dengan metode sejarah lisan.

Kota Dumai pada mulanya merupakan sebuah dusun kecil yang terletak di pinggir pantai yang hanya dihuni oleh beberapa orang nelayan. Penduduk Dumai mulai bertambah pada saat masuknya Jepang ke Dumai tahun 1942. Namun, perkembangan sejarah Dumai mulai pesat sejak PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) memindahkan pelabuhannya dari Sungai Pakning ke Dumai. Keberadaan Caltex ini membawa perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan Kota Dumai. Perkampungan nelayan itu kemudian berubah menjadi kota yang didatangi para perantau yang berasal dari daerah luar, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa, dan lain sebagainya, sehingga terciptalah keberagaman (*heterogenitas*) di Kota Dumai.

Keberadaan Caltex tersebut juga membawa perubahan bagi mata pencaharian penduduk setempat yakni dari nelayan menjadi buruh dan pegawai Caltex. Seiring dengan itu terjadi pula perluasan wilayah Kota Dumai, yang juga diiringi dengan perkembangan fungsi Kota Dumai. Tidak hanya menjadi "kota minyak", tetapi juga menjadi pusat pendidikan, perekonomian, dan pariwisata.

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah ketimpangan dan kecemburuan sosial serta konflik yang bermuara kepada disintegrasi, maka didirikanlah Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD) yang terdiri dari 15 etnis. Semua permasalahan yang menyangkut konflik suku, ras dan agama serta permasalahan sosial lainnya dimufakatkan di dalam LKKMD tersebut, sehingga konflik yang berkembang dapat diminimalisir secepat mungkin.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Sastra, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang penulis butuhkan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan saat penelitian, yaitu kepada seluruh Karyawan dan Pegawai PT. CPI Kota Dumai, Pegawai Kantor Walikota Dumai, Pegawai BAPPEDA Kota Dumai, Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Dumai, Pegawai Badan Pusat Statistik Kota Dumai, Pegawai Pustaka Wilayah Kota Dumai, Pegawai Dinas Pasar Kota Dumai, Pegawai Dinas Pendidikan Kota Dumai, Pegawai Pustaka Wilayah Provinsi Riau, Ketua Penasehat Lembaga Adat Melayu Kota Dumai dan Penasehat Laskar Adat Melayu Kota Dumai, dan Ketua Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai.

Karya tulis ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam penulis persembahkan kepada Ayahanda Masotik dan Ibunda Asmidar Wati (Engkaulah Ibu terbaik yang pernah penulis miliki) serta Abang Riki Mulyadi dan Adik-adik Dewi Purnama Sari, Nurma Fitria dan Agus Suwanto, juga untuk kedua keponakan Fauzan Al Farozzi dan M. Rafa serta kakak ipar Awe. Terima kasih untuk bantuan dan dorongan keluarga semuanya, baik bantuan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis selama masih kuliah dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pengorbanan kalian takkan penulis sia-siakan.

Terima kasih buat Keluarga Besar MAPASTRA untuk semua hati, jiwa, dan semangatnya “Salam Lestari”. Kepada saudara-saudara seperjuangan angkatan 2003

antara lain Kusasi, Yasril, Fakhri, Arie, M. Yunus, Rizky, Farid, Ricky, Dayat, Mora, Dion, Rahmat, Taufik, Adek, Robby, Rika, Adrina, Malta, Risella, Riva, Mariati, Ezza, Darwatni, Mai, Weli, Desi, Eci, Aisya, Anita, Noni, Titin (akhirnya tamat juga), Meri, Dewi, Siska, dan Hesti (kebersamaan dan kegilaan kita tidak akan penulis lupakan dan bersama kalian penulis menikmati masa-masa kuliah ^.^). Kakak senior angkatan 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 dan adik yunior angkatan 2004, 2005, dan 2006, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Terima kasih buat kebersamaan teman-teman di Pondokan Nabila, Pondokan Inyak dan Kosan Arinda. Juga buat teman-teman KKN Salayo Tanang Bukik Sileh Solok 2006, yaitu Widia, Widi, Dwi, Vira, Adi, Dibya, dan Ibnu (kebersamaan dan persaudaraan kita selama kurang lebih dua bulan akan selalu penulis ingat, walaupun kadang kita saling berselisih paham).

Teristimewa buat Bang Ronal, *pacar sekaligus teman tempat penulis meluapkan segala unek-unek yang menyakitkan dan menyedihkan, yang selalu setia menemani, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan segala keluhan kesahku. Kaulah yang terindah yang pernah kumiliki.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua pihak. *Wassalam.*

Padang, April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISTILAH.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Analisis.....	11
E. Metode Penelitian dan Bahan Sumber.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II DUMAI SEBELUM TAHUN 1999.....	 18
A. Lingkungan Geografis Dumai.....	18
B. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Dumai.....	25
C. Caltex dan Pertumbuhan Kota Dumai.....	33
 BAB III KOTA DUMAI TAHUN 1979-2005.....	 58
A. Pemerintahan Kota Dumai: Dari Kota Administratif Sampai Kota Otonom.....	58
B. Pertumbuhan Penduduk dan Perekonomian Dumai	65
C. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kota Dumai	
a. Pasar.....	75
b. Pendidikan.....	80
c. Jaringan Transportasi.....	83
d. Pariwisata.....	92
 BAB IV KESIMPULAN.....	 97
 DAFTAR PUSTAKA.....	 100
DAFTAR INFORMAN.....	104
LAMPIRAN	

Tabel 16 Jumlah Murid Menurut Tingkatan Sekolah di Kota Dumai Tahun 1999 - 2005 (dalam jiwa).....	81
Tabel 17 Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah di Kota Dumai Tahun 1999-2005 (Jiwa).....	81
Tabel 18 Jumlah Sekolah Agama Islam, Guru dan Murid di Kota Dumai Tahun 2001 – 2005.....	82
Tabel 19 Nama-Nama Perguruan Tinggi dan Tahun Berdiri di Kota Dumai Tahun 2005.....	82
Tabel 20 Pembangunan Jalan di Kota Dumai Tahun 1999-2005 (dalam km).....	84
Tabel 21 Jenis-jenis Angkutan Darat dan Perusahaannya serta Jumlahnya di Kota Dumai Tahun 2001 – 2004.....	85
Tabel 22 Jumlah Kendaraan dan Penumpang Yang Keluar/ Masuk Melalui Terminal Bus Dumai Tahun 2001-2005.....	86
Tabel 23 Jumlah Perusahaan Pengguna Jasa Pelabuhan Dumai Tahun 2001 – 2004.....	87
Tabel 24 Jumlah Kapal Penumpang dan Penumpang Yang Datang dan Berangkat di Pelabuhan Dumai Tahun 2001 – 2004.....	90
Tabel 25 Jumlah Pesawat dan Penumpang Yang Datang dan Berangkat Melalui Bandar Udara Pinang Kampai Kota Dumai Tahun 1999 – 2005.....	92
Tabel 26 Potensi Pariwisata Kota Dumai.....	93
Tabel 27 Daftar Hotel/ Penginapan/ Wisma Serta Fasilitas Yang Dimiliki di Kota Dumai Tahun 2005.....	96

SD : Sekolah Dasar
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas
SLC : *Sumatera Light Crude*
TK : Taman Kanak-kanak
Texaco : *Texas Company*
UP : Unit Pengolahan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peta dan Batas Kota Dumai
- Lampiran 2 Struktur Tata Ruang Kota Dumai 1985-2005
- Lampiran 3 Peta Kabupaten Bengkalis
- Lampiran 4 Peta Provinsi Riau
- Lampiran 5 Foto-foto Kota Dumai
- Lampiran 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1979
Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai
- Lampiran 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Dumai pada mulanya merupakan sebuah dusun kecil yang hanya dihuni oleh beberapa nelayan di pinggir pantai. Menurut cerita rakyat, Dumai berasal dari kata “damai”, yang artinya kedamaian penduduk asli dengan tentara Aceh yang pernah menyerang ke wilayah itu.¹ Penduduk itu merupakan peladang yang berpindah dari Batu Panjang Kecamatan Rupat, mereka berladang dan membangun pondok-pondok kecil sebagai tempat tinggal. Daerah Dumai yang pertama kali di huni oleh penduduk yaitu di sekitar Pangkalan Sesai.² Pada tahun 1920 dusun Dumai berada di bawah pemerintahan Kepala Desa (penghulu) Batu Panjang yang bernama Encik Ismail.³

Pada masa pendudukan Jepang sejak tahun 1942, kaum romusha dari Jawa didatangkan pemerintah ke Dumai untuk memasang pipa air yang memanjang dari Duri ke Dumai. Pipa itu mengalirkan air dari Duri ke Dumai yang akan diuji muatan minyak dalam air tersebut dan membuat jalan (rel) kereta api. Pemerintah pendudukan Jepang membangun pelabuhan Dumai pada tahun 1943 dengan maksud

¹ Nazar Dahlan, *Sejarah Riau*, (Pekanbaru: Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, 1979), hal. 43.

² *Ibid.*, hal. 20.

³ *Ibid.*, hal. 23.

untuk mengalirkan minyak dari daerah Duri ke kapal-kapal tanki yang telah disediakan di pelabuhan tersebut.⁴

Pada akhir bulan Agustus 1945, di daerah Riau tersebar berita tentang penyerahan tanpa syarat bala tentara Jepang kepada pasukan Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 yaitu setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara Sekutu.⁵ Setelah proklamasi kemerdekaan diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, usaha eksploitasi Jepang terhadap minyak bumi diteruskan oleh PT. CPI (Caltex Pacific Indonesia) yang pada mulanya bernama PT. Socal Indonesia. Usaha itu berhasil menemukan sumber-sumber minyak, karena itu pelabuhan Dumai difungsikan untuk penyaluran minyak tersebut.⁶

Dumai semakin berkembang semenjak PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) memindahkan pelabuhannya dari Sungai Pakning ke Dumai. Pada tahun 1952 dibangunlah jalan tembus dari daerah penghasil minyak di Kabupaten Bengkalis, tepatnya dari daerah Duri menuju Dumai. Pipa-pipa raksasa untuk mengalirkan minyak mentah dibangun sepanjang 200 km dengan posisi memanjang di tepi jalan raya. Pada tahun 1959, pelabuhan minyak selesai didirikan dan mulai digunakan. Melihat perkembangan positif yang terjadi, Pertamina UP (Unit Pengolahan) II pun memanfaatkan wilayah sekitar pelabuhan sebagai lokasi pengilangan minyak, yang dinamakan Kilang Minyak Putri Tujuh.⁷

⁴ *Monografi Kota Administratif Dumai 1984*, hal. 3.

⁵ Ahmad Yusuf, dkk, *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942, Jilid I* (Pekanbaru: Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, 2004), hal. 129.

⁶ *Monografi Kota Administratif Dumai 1984*, hal. 6.

⁷ Silva Yuliana, dkk, *Dumai Tempo Doeloe* (Dumai: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai, 2004), hal. 23.

Pada mulanya perusahaan Kilang Minyak Putri Tujuh ini mengeksport minyak melalui Sungai Pakning. Pada mulanya minyak mentah diangkut dengan kapal tanker ke hilir Sungai Siak, karena dipandang kurang efisien maka kemudian dipindahkan ke Dumai pada tahun 1962. Hal ini disebabkan karena arus lalu lintas di sepanjang Sungai Siak yang semakin padat dan sempit.⁸

Pada tahun 1959 dimulailah pembangunan pelabuhan di Dumai, dan bersamaan dengan itu dibentuk pula Perwakilan Pelabuhan Belawan (PPB). Caltex yang semula memiliki Pelabuhan Kargo I akhirnya menyerahkan pelabuhan tersebut kepada PPB, dan Caltex membuat pelabuhan baru. Pelabuhan yang baru ini tumbuh dan berkembang dengan cepat sehingga pada tahun 1970 dibentuklah Kepala Daerah Pelabuhan (Kadapel). Kadapel ini membawahi tiga provinsi yaitu Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Pelabuhan Dumai pada awal 1980-an dikembangkan melalui pembangunan Pelabuhan Kargo II dan Kargo III.⁹ Dampak langsung keberadaan pelabuhan ini adalah meningkatnya kegiatan sektor tersier yaitu perdagangan dan jasa. Pemanfaatan pelabuhan sebagai tempat keluar masuk manusia serta bongkar muat barang membuka lapangan pekerjaan.

Sebelum tahun 1959, Dumai memiliki status sebuah desa dalam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis,¹⁰ seiring dengan perkembangan Dumai sebagai daerah pelabuhan, maka pada tahun 1959 Dumai menjadi kecamatan tersendiri. Kemudian dalam kurun waktu tahun 1963 sampai 1964 Dumai berstatus sebagai sebuah

⁸ "Romantika Pengapalan dan Ekspor Minyak Bumi" dalam *Warta Caltex* Nomor 18, 1989, hal. 28.

⁹ Wawancara dengan Dahlan, Pegawai Bagian Humas Pertamina UP II Dumai, di Dumai pada tanggal 9 September 2008.

¹⁰ *Monografi Kota Administratif Dumai 1984*.

kewedanan yang membawahi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dumai: Ibu Negerinya Dumai, Kecamatan Rupat: Ibu Negerinya Batu Panjang, dan Kecamatan Mandau: Ibu Negerinya Duri.¹¹ Dumai sebagai daerah pelabuhan minyak Caltex mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga pada tahun 1979 Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai, yang membawahi dua kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Timur.¹²

Kota Administratif Dumai merupakan bagian dari daerah Kabupaten Bengkalis yang terletak pada jalur strategis lalu lintas pelayaran pantai timur Pulau Sumatera yang berhubungan dengan kota-kota pelabuhan nasional dan pelabuhan di Selat Malaka. Dalam kurun waktu lebih kurang 20 tahun sejak ditetapkannya Kota Dumai menjadi Kota Administratif, Kota Dumai tumbuh dan berkembang cukup pesat, yang mengakibatkan semakin meningkatnya beban tugas dan volume kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Administratif Dumai di bidang pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.¹³ Dalam kaitan itulah maka pada tahun 1999 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999,¹⁴

¹¹ *Monografi Kabupaten Bengkalis*, 1990, hal. 7.

¹² *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai*, Pasal 5.

¹³ H. Nahar Effendi Yusuf, *Merajut Asa, Menggapai Cita: Perjuangan Masyarakat Dumai Menuju Kota Mandiri* (Dumai: Kerjasama Pemerintah Kota Dumai Dengan Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD), 2007), hal. 86.

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai*.

kemudian status kotamadya diubah menjadi kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.¹⁵

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di bawah semangat otonomi daerah, merupakan salah satu hasil reformasi politik dan pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1998. Undang-Undang ini memberikan banyak kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri kecuali pada lima bidang yaitu agama, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan hukum. Di luar kelima sektor tersebut, sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab daerah.¹⁶

Berdasarkan kewenangan itu maka Pemerintah Daerah dapat meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam hal merekayasa pembangunan sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber dayanya tanpa harus menunggu izin dari Pemerintah Pusat, dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.¹⁷ Pemerintah Kota Dumai melalui Undang-Undang itu mempunyai keleluasaan dalam mengatur rumah tangganya sendiri, baik itu dalam hal pembangunan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya tanpa campur tangan dari Pemerintah Pusat.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah menjadi Kota, Dumai memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat terutama di bidang ekonomi. Salah satu indikator

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Djoko Sudantoko, *Dilema Otonomi Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2003), hal. 33.

¹⁷ A. W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 19.

Bugis, Banjar, Jawa dan Sunda dan etnis Tionghoa. Suku yang paling dominan jumlahnya di kota itu adalah Suku Melayu. Bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Melayu. Penduduk Kota Dumai mempunyai berbagai jenis pekerjaan seperti karyawan, buruh, pedagang, nelayan, petani, pegawai pemerintah dan polisi.²¹

Di dalam kehidupan beragama, penduduk Dumai memiliki kepercayaan yang beragam yaitu sebagai pemeluk Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. Mayoritas penduduk Dumai memeluk Agama Islam.

Pada awal terbentuknya Kota Dumai, penduduknya berjumlah 156.966 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km². Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000, jumlah penduduk telah meningkat menjadi 174.706 jiwa. Pertumbuhan penduduk Dumai dalam satu tahun setelah menjadi Kota Otonom meningkat lebih kurang 11,3%.²²

Pembangunan Kota Dumai difokuskan pada pengembangan industri, perdagangan dan jasa. Untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah Kota Dumai juga memperhatikan pembangunan fisik, antara lain jalan raya, listrik, air minum, pelabuhan, dan perumahan.²³

Bidang pendidikan juga menjadi fokus perhatian pemerintah Kota Dumai. Pertumbuhan pendidikan di Kota Dumai dari tahun 1999 sampai tahun 2005 mengalami peningkatan yang baik jika dibandingkan dengan awal berdirinya Kota

²¹ Wan Syamsir Yus dan Herdi Salioso, *Comparative Advantage Kota Dumai: Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Provinsi Riau* (Pekanbaru: UNRI Press, 2002), hal. 27.

²² *Dumai Dalam Angka* (Dumai: BPS, 2000).

²³ Wawancara dengan Riki, Buruh Bangunan, di Dumai pada tanggal 12 September 2008.

Dumai.²⁴ Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pembangunan sekolah-sekolah, yakni pada tahun 1999 jumlah Sekolah Dasar (SD) ada 77 buah sekolah, enam tahun kemudian meningkat menjadi 90 buah SD (tahun 2005), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ada 20 buah, tahun 2005 meningkat menjadi 28 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ada tujuh buah, tahun 2005 meningkat menjadi 18 buah. Jumlah keseluruhan sekolah itu dari tingkat SD sampai SLTA adalah sebanyak 136 buah sekolah, 39 di antaranya adalah milik swasta atau sekitar 28,6%.²⁵

Penulisan tentang Kota Dumai bisa dilihat pada skripsi yang ditulis oleh Rizki dengan judul “Industrialisasi dan Perubahan Masyarakat Di Dumai 1969-1999” (2003). Penulisan skripsi itu difokuskan pada perkembangan industri perminyakan di Kota Dumai serta pengaruhnya bagi masyarakat Dumai. Ada juga skripsi yang ditulis oleh Jufri Sahrin dengan judul “Perkembangan Perusahaan Pengelola Pelabuhan: Studi Kasus PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai 1991-1999” (2007). Penulisan skripsi itu difokuskan pada perkembangan PT. Pelindo I Cabang Dumai dari awal berdirinya pada tahun 1991 sampai tahun 1999, yaitu pada saat diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah. Perkembangan yang dimaksud dalam penulisan skripsi itu meliputi aktifitas PT. Pelindo I Cabang Dumai pada lingkungan kerja pelabuhan Dumai dan menjelaskan tentang sistem manajemen PT. Pelindo I Cabang Dumai. Selain skripsi, karya lainnya yang berhubungan dengan Kota Dumai bisa dilihat pada buku yang ditulis oleh Dinas Pariwisata Kota Dumai yang berjudul *Dumai Tempo Doeloe* (2004). Dalam buku itu

²⁴ Wawancara dengan Rosna, Guru, di Dumai pada tanggal 13 September 2008.

²⁵ *Dumai Dalam Angka* (Dumai: BPS, 2005).

dibahas tentang perkembangan dan perjalanan sejarah Kota Dumai sebagai kota pelabuhan. Buku karangan Wan Syamsir Yus dan Herdi Salioso yang berjudul *Comparative Advantage Kota Dumai: Dalam Menunjang Percepatan Provinsi Riau* (2002). Tulisan dalam buku tersebut difokuskan pada kondisi sosial, ekonomi, politik, geografis, dan peluang investasi di Kota Dumai, serta program proyek pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Dumai, yang meliputi pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan.

Berbeda dengan karya-karya di atas, maka penulisan skripsi ini bermaksud membahas tentang sejarah perkembangan Kota Dumai terutama setelah Dumai berubah menjadi Kota Otonom. Dalam konteks itulah tulisan ini diberi judul "Sejarah Kota Dumai 1979-2005".

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas di sini adalah perkembangan Kota Dumai tahun 1979-2005. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Kota Dumai dan batasan temporalnya adalah dari tahun 1979 sampai tahun 2005. Pemilihan tahun 1979 untuk melihat perkembangan Kota Dumai sejak diresmikannya sebagai Kota administratif sampai menjadi pemerintahan kota (1999), karena pada tahun inilah dimulainya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat tentang otonomi daerah, sehingga melahirkan tuntutan guna menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan daerah. Dumai yang merupakan bagian dari Provinsi Riau juga terkena imbas dari tuntutan tersebut, yaitu perubahan status pemerintahan Dumai dari Kota Administratif menjadi Kota. Batasan akhir tahun 2005 karena seiring dengan

berakhirnya masa kepemimpinan H. Wan Syamsir Yus sebagai Walikota Dumai (2005).

Untuk lebih memfokuskan penulisan ini maka ruang lingkup permasalahan yang dipelajari dapat dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perubahan pemerintahan Kota Dumai dari kota administratif sampai menjadi kota otonom?
2. Bagaimanakah pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kota Dumai sejak tahun 1999 sampai tahun 2005?
3. Bagaimanakah perkembangan sarana dan prasarana Kota Dumai, seperti pasar, pendidikan, jaringan transportasi, dan pariwisata sejak tahun 1999 sampai tahun 2005?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bentuk perubahan pemerintahan Kota Dumai dari kota administratif sampai menjadi kota otonom.
2. Menjelaskan pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kota Dumai sejak tahun 1999 sampai tahun 2005.
3. Menjelaskan perkembangan sarana dan prasarana Kota Dumai, seperti pasar, pendidikan, jaringan transportasi, dan pariwisata sejak tahun 1999 sampai tahun 2005.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan Dumai dalam beberapa aspek penting. Pada awalnya Dumai

merupakan sebuah dusun kecil yang kemudian ditingkatkan menjadi kota administratif sampai akhirnya berubah menjadi kota sampai sekarang.

D. Kerangka Analisis

Penulisan ini membicarakan perjalanan Kota Dumai dari tahun 1979 sampai 2005, berarti tergolong dalam kajian sejarah kota. Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah kota membicarakan pertumbuhan sebuah daerah dari masa ke masa sebagai pusat pemukiman, tempat terjadinya beberapa kegiatan yang berupa pelayanan, kemudahan, perdagangan, pemerintahan, pementasan kesenian, proses produksi, dan lain sebagainya.²⁶ Perkembangan yang terjadi di kota dikarenakan adanya pembangunan. Pembangunan harus lebih diarahkan dan dilaksanakan secara merata, bukan hanya pembangunan fisik semata tetapi juga pada tuntutan pembangunan kebudayaan serta kebutuhan untuk seluruh masyarakatnya.

Menurut catatan sejarah, awal terbentuk dan berkembangnya kota adalah berasal dari tempat pemukiman yang sangat sederhana, selanjutnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan pertumbuhan masyarakatnya.²⁷ Daerah yang semula dijadikan sebagai tempat pemukiman penduduk yang kemudian disebut desa. Lama kelamaan tumbuh dan berkembang secara alamiah, dan dengan kriteria tertentu menjadi sebuah kota. Proses terjadinya bermacam-macam, secara lambat atau dalam jangka waktu yang panjang, dan ada juga secara cepat atau dalam waktu relatif

²⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 158.

²⁷ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indo, 1983), hal. 35.

Melihat perkembangan Dumai yang semakin pesat, maka pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai ditingkatkan lagi statusnya menjadi Kotamadya. Akibat adanya ketentuan pemerintah pada tahun 1999, maka status pemerintahan Dumai diganti menjadi pemerintahan kota.

Cara titik pandang terhadap kota berbeda-beda. Pendekatan geografis memandang kota adalah sebagai suatu tempat konsentrasi sejumlah penduduk dan cukup sulit untuk menentukan jumlah penduduk tersebut sebagai ukuran sebuah kota. Pendekatan ekonomis memandang kota sebagai tempat pertemuan lalu lintas ekonomi dan tempat terpusatnya perdagangan, industri dan kegiatan-kegiatan non agraris di mana peredaran uang cepat sekali.³²

Klasifikasi kota menggunakan indikator yang bersifat non-numerik adalah melihat kepada fungsi kota itu sendiri. Fungsi kota ditandai dengan mayoritas aktifitas dan usaha yang terjadi di kota itu sendiri. Jika banyak berdiri pabrik-pabrik dibandingkan dengan aktifitas lainnya maka kota tersebut diklasifikasikan sebagai kota industri.³³

Menurut Bintarto, kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai oleh strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Kota sebagai pusat produksi, menurutnya adalah biasanya terletak dan dikelilingi oleh daerah-daerah penghasil bumi atau hasil tambang, sehingga dapat terjadi dua macam kota, yaitu

³² S. Pamudji, *Pembinaan Perkantoran di Indonesia Tinjauan Aspek Administrasi Pemerintahan* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 5.

³³ Azwar, *Pendekatan Klasifikasi Kota Dunia dan Indonesia: Mulai dari cara Numerik sampai Non-Numerik* (Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND, 2006), hal. 9.

kota-kota penghasil bahan mentah dan kota-kota yang mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang-barang jadi. Di daerah-daerah ini dapat timbul daerah-daerah dengan kota-kota industri, di mana pusat-pusat tersebut dihubungkan dengan jalan transportasi antara kota dengan kota dan antara kota dengan daerah belakangnya.³⁴

Kota industri adalah kota yang di dalamnya terdapat aktifitas atau keterampilan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi bahan mentah menjadi barang jadi.³⁵ Industri adalah perusahaan yang mengambil bahan dasar dari alam kemudian langsung mengolahnya melalui peralatan mekanik yang kompleks.³⁶ Atau kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin. Industri terbagi lagi dalam beberapa jenis, seperti industri hilir yakni industri yang memproduksi barang-barang yang siap dipakai oleh konsumen, dan industri hulu adalah industri yang memproduksi bahan baku dan bahan penolong.³⁷ Menurut penjelasan di atas, Dumai termasuk dalam kota industri yang bergerak dalam usaha pengilangan minyak bumi dan kegiatan ini masih berlanjut sampai sekarang.

Pembukaan daerah Dumai sebagai daerah pelabuhan dan industri perminyakan, dan pembangunan proyek-proyek yang dirintis oleh Caltex, Pertamina, dan PN. Pelabuhan, kemudian mengundang kedatangan penduduk yang berasal dari luar Propinsi Riau dengan beragam suku bangsa dan agama. Mereka datang ke Dumai dengan tujuan untuk bekerja sebagai karyawan dan buruh di perusahaan-perusahaan

³⁴ *Ibid.*, hal 10-11.

³⁵ *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve), hal. 1442.

³⁶ *Ibid.*, hal. 1442-1443.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 377-378.

Humas Pertamina), Andi (Penasehat Lembaga Adat Melayu dan Penasehat Laskar Melayu Bersatu Kota Dumai), Teguh (pegawai swasta), Wahyu (pegawai Kantor Walikota Dumai Bagian Tata Usaha), Riki (buruh bangunan), dan Rosna (guru).

Dalam penelitian lapangan dan kepustakaan diperoleh sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer, di antaranya *Monografi Kabupaten Bengkalis*, *Monografi Kota Dumai*, dan *Arsip-Arsip* dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai dan Pemerintahan Kota Dumai, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai*, dan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai*. Sedangkan sumber sekunder yang diperoleh yakni dari buku-buku dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Tahap kedua adalah dilakukannya verifikasi atau kritik terhadap sumber yang telah didapatkan dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber yang ada sehingga mendapatkan suatu fakta. Kritik ini terbagi dua macam yaitu kritik eksteren dan interen. Kritik eksteren dilakukan terhadap sumber tertulis maupun lisan (wawancara) untuk melihat keotentikan atau keashian sumber, sedangkan kritik interen menyangkut kredibilitas dari sumber yang didapatkan (dapat dipercaya).⁴⁰ Kritik dilakukan terhadap sumber yang didapatkan, baik secara tertulis seperti arsip kota maupun wawancara dengan sejumlah informan, agar hasilnya obyektif. Berdasarkan kritik sumber tersebut didapatkanlah fakta sejarah.

⁴⁰ Suhartono, *Penelitian Arsip* (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Sastra UGM, tanpa tahun terbit), hal. 4.

Tahap ketiga adalah interpretasi yakni fakta-fakta yang telah ada dirangkai menjadi satu kesatuan pengertian. Selanjutnya tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan yang akan menguraikan temuan hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dituangkan dalam empat bab penjelasan. Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan Kota Dumai 1979-1999, yang terdiri dari lingkungan geografis Dumai, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Dumai, dan Caltex dan Pertumbuhan Kota Dumai. Bab III membicarakan perkembangan Kota Dumai Tahun 1999-2005 menguraikan tentang pemerintahan Kota Dumai: dari kota administratif sampai menjadi kota otonom, pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kota Dumai, dan perkembangan sarana dan prasarana Kota Dumai yang terdiri dari pasar, pendidikan, jaringan transportasi, dan pariwisata. Bab selanjutnya adalah Bab IV merupakan bagian kesimpulan.

BAB II

KOTA DUMAI 1979 - 1999

A. Lingkungan Geografis Kota Dumai

Kota Dumai mempunyai luas wilayah 1.727,38 km². Dilihat dari segi geografis, Kota Dumai merupakan suatu daerah yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kota Dumai terletak di sebelah Pantai Timur Pulau Sumatera yang menghadap ke Selat Malaka, Selat Rupat, Selat Bengkalis, dan Pulau Rupat. Kondisi geografis yang demikian menyebabkan Dumai mempunyai posisi sebagai pintu gerbang Provinsi Riau untuk Negara Malaysia dan Singapura.¹

Secara astronomis, Kota Dumai berada pada posisi 1°-35'-19" sampai dengan 1°-42'-33" LU dan 101°-23'-37" sampai dengan 101°-28'-13" BT.² Kondisi iklim di daerah Dumai bersifat tropis basah, yang dipengaruhi oleh sifat iklim laut, dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, dengan ketinggian sekitar dua meter di atas permukaan laut. Suhu udara di daerah Dumai berkisar pada 26°C suhu terendah dan 32°C suhu tertinggi, dengan kelembaban udara rata-rata 82%

¹ Agoes Budianto, dkk, *Dumai Tempo Dulu, Dumai Sekarang* (Dumai: Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai, 2007), hal. 4.

² H. Nahar Effendi Yusuf, *Merajut Asa, Menggapai Cita: Perjuangan Masyarakat Dumai Menuju Kota Mandiri* (Dumai: Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD), 2007), hal. 87.

- 84%. Keadaan cuaca seperti ini sangat mendukung pengembangan pemukiman maupun pertanian, perkebunan, dan perikanan serta peternakan.³

Pada saat menjadi Kota Administratif (1979-1999), Dumai memiliki luas 184,58 km² dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan Selat Rupat, sebelah Timur dengan Parit Bengkok, sebelah Barat dengan Sungai Mesjid, dan sebelah Selatan dengan Kelurahan Bagan Besar.⁴ Sejak menjadi Kota (1999) dengan luas 1.727,38 km², wilayah Dumai dimekarkan dan batas-batas wilayah Kota Dumai sekarang adalah: sebelah Utara dengan Selat Rupat Kabupaten Bengkalis, sebelah Timur dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, sebelah Selatan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.⁵

Topografis Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di sebelah Utara dengan kemiringan lereng 0 - 3%, dengan bentuk dataran yang landai dan sebagian lagi terdiri dari bukit-bukit di sebelah Selatan dengan bentuk yang sedikit bergelombang. Pada umumnya struktur tanah yang terdapat di daerah Selatan Kota Dumai berupa tanah *podsolik* yang berwarna merah kuning dan sedikit berpasir yang terdiri dari batuan endapan. Kondisi tanah seperti itu sangat cocok untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit, pinang, dan pinus. Sedangkan daerah Utara Kota Dumai yang berdekatan dengan perairan laut dan sungai, umumnya struktur tanahnya

³ Bagian Humas Pemerintah Kota Dumai, *Kondisi dan Peluang Investasi Kota Dumai* (Dumai: Pemerintah Kota Dumai, 2002), hal. 18.

⁴ *Monografi Kota Administratif Dumai 1984*, hal. 40.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai*, Pasal 6 Ayat 1.

berupa *alluvial*, tanah *organosol* dan *gley* humus dalam bentuk gambut yang berawarawa atau tanah basah, meliputi dataran rendah. Jenis tanah ini berkadar asam rendah dan miskin akan unsur hara. Namun, tanah ini masih dapat digunakan untuk lahan pertanian tanaman padi, kelapa, dan sagu.⁶

Wilayah Dumai dialiri oleh 16 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong,⁷ sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Pelintung, Sungai Kepala Beruang, Sungai Selinsing, Sungai Tanjung Leban, Sungai Merambung, Sungai Kemeh, Sungai Mesjid, Sungai Nerbit, Sungai Mampu, Sungai Teras, Sungai Buluala, Sungai Geniut, Sungai Dumai, Sungai Santaulu, Sungai Senepis, dan Sungai Teluk Dalam. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Buluala dengan panjang 40 km, Sungai Senepis 35 km dan Sungai Mesjid 29 km. Sungai-sungai tersebut bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka.⁸

Sungai-sungai yang ada di Kota Dumai ini mempunyai bentuk yang berkelok-kelok dan melintasi tengah kota dan ditumbuhi oleh tumbuhan nipah, rumbia, dan bakau. Air sungai itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Di samping itu, sungai-sungai itu juga dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah dan toilet. Akibat dari kegiatan itu menyebabkan kondisi air tidak bersih dan tidak sehat. Kualitas air sungai-sungai yang ada umumnya payau asin dan berwarna kekuningan dan kehitam-hitaman sehingga tidak cocok untuk

⁶ *Dumai Dalam Angka* (Dumai: BPS, 2004), hal. 3.

⁷ *Kapal Pompong* adalah sejenis kapal yang berbentuk seperti kapal tongkang, yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang-barang ekspor-impor seperti beras, gula, bawang, dan kayu balak.

⁸ Bagian Humas Pemerintah Kota Dumai, *Profil Kota Dumai* (Dumai: Pemerintah Kota Dumai, 2007), hal. 10.

dijadikan air minum. Pada umumnya air yang berasal dari tanah tidak bisa digunakan untuk air minum karena berwarna kekuningan serta kehitam-hitaman. Masyarakat Kota Dumai menggunakan air hujan dan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk keperluan minum.⁹

Wilayah Selatan Kota Dumai terdapat hutan alam, yang merupakan hutan heterogen yang terdiri dari bermacam-macam jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan Dumai terdiri dari pinus, jati, meranti, mahoni, kempas, akasia, dan mahang. Tumbuhan ini merupakan komoditi ekspor dari daerah Dumai karena dari tumbuhan ini bisa menghasilkan kayu yang berguna untuk bahan bangunan dan perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan lemari.¹⁰

Lahan pertanian di Kota Dumai masih sangat luas, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Kendala yang dihadapi selain masalah modal, juga adanya masalah status lahan yang masih disebut sebagai ex HPH. Luas lahan yang potensial sekitar 19.600 ha. Lahan yang telah digarap seluas 13.675,75 ha, dengan tanaman utama yakni padi, palawija dan hortikultura. Luas lahan yang belum digarap seluas 5.924 ha, yang merupakan potensi investasi terutama untuk tanaman padi seluas 4.066 ha, palawija seluas 1.140,50 ha, dan hortikultura seluas 717,25 ha.¹¹

Empat kecamatan yang ada di Kota Dumai yaitu Kecamatan Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kapur dan Dumai Barat merupakan wilayah yang memiliki sumber daya lahan yang potensial untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri

⁹ Riski, "Industrialisasi dan Perubahan Masyarakat Di Dumai 1969-1999" *Skripsi Sarjana* (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2003), hal. 21.

¹⁰ *Loc.cit.*, hal. 15.

¹¹ *Brosur* Kota Dumai.

dengan rekayasa teknologi tepat guna *byocyclo farming*, seperti padi, palawija, sayur mayur, pisang, nenas, durian, mangga, rambutan, sawit, dan aneka ternak (sapi, kambing, itik dan ayam) serta budidaya tambak ikan air tawar (ikan patin, ikan mas, ikan gurami serta ikan hias).¹² Adapun luas panen dan produksi padi dan palawija menurut kecamatan di Kota Dumai tahun 1986¹³ dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija Menurut Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 1986

No.	Jenis Komoditi	Kecamatan Dumai Barat		Kecamatan Dumai Timur	
		Luas (ha)	Panen Produksi (ton)	Luas (ha)	Panen Produksi (ton)
1.	Padi Sawah	14	44	-	-
2.	Padi Ladang	38	299,7	-	-
3.	Jagung	41	12	-	-
4.	Ubi Kayu	117	700,2	10	40
5.	Ubi Jalar	16	54	-	-
6.	Kacang Tanah	54	139	-	-
7.	Kacang Kedelai	9	24	-	-
8.	Kacang Hijau	12	31	-	-
Jumlah		301	1.303,9	10	40

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis Tahun 1987

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pola pengusahaan lahan di Kecamatan Dumai Barat relatif lebih intensif dibandingkan dengan lahan di Kecamatan Dumai Timur. Hal ini disebabkan karena tanah di Kecamatan Dumai Barat bersifat asam dan miskin akan unsur haranya sehingga kadang-kadang tanaman tidak bagus tumbuhnya.

¹² Wawancara dengan Muchlis Suzantri, Pegawai Bagian Sarana dan Prasarana Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 2 Maret 2009.

¹³ Adnan Kasry, dkk, *Inventarisasi Potensi dan Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup* (Pekanbaru: BAPPEDA Provinsi Daerah Tingkat I Riau, 1987), hal. 141.

Luas panen sayur-sayuran menurut kecamatan di Kota Dumai tahun 1986

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Luas Panen Sayur-sayuran Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 1986

No.	Jenis Komoditi	Kecamatan Dumai Barat	Kecamatan Dumai Timur
		Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)
1.	Cabe	6,5	0,5
2.	Kacang panjang	14	2
3.	Terung	8	-
4.	Bayam	11	0,3
5.	Kangkung	55	0,8
6.	Lain-lain	4	-
Jumlah		98,5	3,6

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis Tahun 1987

Lahan yang ada di Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan bagi usaha peternakan karena terdapatnya lahan yang luas, semak belukar, dan padang rumput untuk pemeliharaan ternak. Adapun banyaknya ternak yang dipelihara penduduk menurut kecamatan di Kota Dumai tahun 1986 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Banyaknya Ternak Yang Dipelihara Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 1986

No.	Jenis Ternak	Kecamatan Dumai Barat	Kecamatan Dumai Timur
		(ekor)	(ekor)
1.	Kerbau	25	-
2.	Kambing	7.468	376
3.	Babi	253	410
4.	Ayam Kampung	18.310	8.837
5.	Ayam Ras	3.062	-
6.	Itik	5.770	1.053
7.	Lain-lain	253	23
Jumlah		34.941	10.699

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis tahun 1987

Kota Dumai mempunyai posisi yang bersifat strategis yakni sebagai pintu gerbang dari Pantai Timur Sumatera, dan pada bagian Utara dihubungi oleh Selat Rupat, selanjutnya Selat Malaka menuju kota lain, yakni Belawan (Medan), Bagansiapi-api, Selat Panjang, Malaysia, Batam dan Singapura. Untuk hubungan ini, angkutan yang digunakan adalah angkutan laut. Pada bagian Selatan dan Barat Daya sekitarnya dihubungkan oleh jalan darat menuju Kota Duri, Minas, Rumbai, Pekanbaru, Medan, dan sekitarnya.¹⁴

Kota Dumai merupakan pintu masuk dan keluar bagi orang-orang dari Kepulauan Riau dan negeri tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Pelabuhan Kota Dumai merupakan pelabuhan terbesar di Riau Daratan dengan jalur pelayaran internasional yang berhampiran dengan Negara Malaysia. Hal itu menjadikan Dumai sebagai kota perantara bagi perdagangan nasional maupun internasional dan keluar masuknya penumpang dari dan keluar Dumai.¹⁵

Pada awalnya Dumai merupakan pelabuhan minyak bumi. Pada tahun 1984, sepanjang daerah pantai Dumai terdapat beberapa pabrik minyak dan pengolahan minyak dengan kapasitas 170.000 barrel per hari sampai 200.000 barrel per hari dan dapat menampung 850.000 barrel minyak per hari.¹⁶ Dumai juga disebut sebagai gerbang ekspor minyak Indonesia. Pelabuhan di Dumai telah dibangun sebagai pelabuhan penghubung untuk kegiatan ekspor impor, begitu juga para penumpang yang ingin menuju ke Malaka (Malaysia).

¹⁴ *Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2002*, hal. 3.

¹⁵ Agoes Budianto, dkk, *op.cit.*, hal. 7.

¹⁶ Bagian Humas Pemerintah Kota Dumai, *Profil Kota Dumai* (Dumai: Pemerintah Kota Dumai, 2007), hal. 31.

Jumlah perusahaan pengguna jasa pelabuhan Dumai dalam sektor ekspor-impor dan bongkar-muat barang pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 adalah sebanyak 86 perusahaan yang terdiri dari dua perusahaan eksplorasi dan pengolahan minyak bumi yakni Pertamina UP II Dumai dan PT. CPI Dumai, 37 perusahaan pelayaran, satu perusahaan non pelayaran, 10 perusahaan pelayaran rakyat, 19 perusahaan bongkar muat, delapan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, delapan perusahaan minyak sawit, dan satu perusahaan jasa titipan barang.¹⁷ Untuk menghubungkan Kota Dumai dengan daerah lainnya digunakan kapal ferry yang melayani tujuan Bengkalis, Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Pinang. Di samping itu, terdapat kapal motor ferry dengan tujuan Malaka, Port Dickson (Negeri Sembilan) dan Muar (Johor), selain kapal penumpang Bukit Siguntang dan Lawit yang melayani Dumai - Jakarta setiap minggunya.¹⁸

B. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Dumai

Sebelum tahun 1920-an, kondisi daerah Dumai masih sepi dan penduduknya relatif jarang serta daerahnya masih didominasi oleh hutan tropis. Penduduk ini kebanyakan tinggal di pinggir pantai dan membuat rumah panggung di sana, dan mereka bekerja sebagai nelayan. Pada beberapa bagian di sekitarnya terdapat tanah tebing yang subur dan sedikit ke arah pedalaman. Tanah ini dijadikan oleh penduduk sebagai ladang. Penduduk yang berladang ini berasal dari Bukit Batu. Mereka

¹⁷ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 14.

tebing yang subur dan sedikit ke arah pedalaman. Tanah ini dijadikan oleh penduduk sebagai ladang. Penduduk yang berladang ini berasal dari Bukit Batu. Mereka membuka lahan dengan cara membakar semak belukar dan menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman.¹⁹

Kehidupan masyarakat Melayu berhubungan dengan tanah atau lahan. Karena mata pencaharian penduduk yang pada umumnya bertani, menjadikan masyarakat sangat bergantung pada tanah. Mereka menganggap tanah merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga setiap suku memiliki tanah pusaka atau tanah ulayat masing-masing. Sistem pertanian masyarakat Melayu adalah sistem ladang berpindah-pindah dengan cara membuka lahan baru apabila lahan yang sebelumnya tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan lahan pertanian.²⁰

Penduduk Dumai mulai bertambah pada saat masuknya Jepang ke Dumai tahun 1942. Pada saat itu, Pemerintah Jepang mendatangkan para romusha yang berasal dari Jawa untuk dipekerjakan sebagai buruh kasar pada proyek pembangunan jalan kereta api dari Dumai ke Pekanbaru yang berjarak 204 km.²¹ Jalan kereta api itu digunakan sampai tahun 1945. Bekas jalan kereta api ini sampai sekarang masih dapat ditemui di daerah Bukit Jin Kota Dumai.

¹⁹ Silva Yuliana, dkk, *Dumai Tempo Doeloe* (Dumai: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai, 2004), hal. 21.

²⁰ Wawancara dengan H. Ali Syadikin, Ketua Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 13 Oktober 2008.

²¹ Setelah berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945, proyek pembangunan jalan kereta api ini tidak dilanjutkan lagi, karena pada saat itu mulai dibangun jalan raya yang menghubungkan Dumai-Pekanbaru. Pembangunan jalan itu bertujuan untuk kelancaran ekspor minyak bumi dari ladang minyak Duri, Minas, dan Siak ke pelabuhan Dumai., lihat buku Silva Yuliana, dkk, *Dumai Tempo Doeloe* (Dumai: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai, 2004), hal. 25.

Mata pencaharian penduduk yang pada mulanya sebagai nelayan dan bertani berubah ketika Caltex membuka pelabuhan minyak pada tahun 1959. Banyak penduduk yang meninggalkan pekerjaan lamanya dan beralih pekerjaan menjadi karyawan atau buruh pada proyek pembangunan pelabuhan yang dirintis oleh Caltex, Permina (sekarang Pertamina) dan Perusahaan Negara Pelabuhan (PN. Pelabuhan) yang sekarang berganti nama menjadi PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Semenjak pendudukan Pemerintah Jepang berakhir pada tahun 1945 dan Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1950, wilayah Dumai semakin diramaikan oleh para pendatang dari Bengkalis, Selat Panjang, Tanjung Pinang, dan Tanjung Balai Karimun. Mereka berdatangan ke Dumai karena adanya pembangunan industri perminyakan dan industri pelayaran. Kedatangan mereka ini bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor industri yang sedang berkembang di Dumai.²²

Pada tahun 1960, dalam sektor perdagangan di Kota Dumai lebih banyak dikuasai oleh orang Cina. Dalam menjalankan usaha dagangnya, orang Cina mendirikan bangunan rumah toko (ruko) sebagai tempat usaha dagangnya dan sekaligus sebagai tempat tinggalnya. Lahan atau tanah yang dimiliki oleh orang Cina untuk mendirikan rumah toko itu berasal dari tanah milik masyarakat Melayu yang dijual kepada orang Cina. Masyarakat Melayu Dumai yang bermukim di pusat kota, banyak yang menjual tanah mereka kepada orang Cina. Uang hasil penjualan tanah tersebut mereka gunakan untuk membeli tanah baru di daerah lain di sekitar Dumai seperti di daerah Sukajadi, Bintan, Buluh Kasab, Rimba Sekampung, Teluk Binjai,

²² Wawancara dengan H. Ali Syadikin, Ketua Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 13 Oktober 2008.

dan Datuk Laksamana.²³ Di samping Cina, orang Minangkabau juga bergerak dalam bidang perdagangan di Dumai. Selain itu, mereka juga ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, buruh dan karyawan. Begitu juga dengan orang-orang Batak dan Jawa, mereka juga ada yang bekerja sebagai pedagang, buruh, karyawan, dan lain-lain.

Dalam rentang waktu 29 tahun (1970-1999), jumlah penduduk mengalami peningkatan atau pertumbuhan dengan pesat. Data tentang jumlah penduduk Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 1970 – 1999

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	1970	26.993
2.	1975	50.023
3.	1980	58.108
4.	1985	94.956
5.	1990	104.924
6.	1995	113.025
7.	1999	156.966

Sumber: *BPS Kabupaten Bengkalis Tahun 1970, BPS Kota Dumai Tahun 1980, 1990, dan 1999*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu 1970-1999, jumlah penduduk Kota Dumai mengalami peningkatan. Pada tahun 1970 jumlah penduduk Kota Dumai berjumlah 26.993 jiwa, dan mengalami peningkatan menjadi 156.966 jiwa tahun 1999. Hal ini antara lain disebabkan oleh banyaknya migrasi dari luar daerah Dumai yang datang ke Dumai, dengan dilatarbelakangi adanya faktor industri,

²³ Wawancara dengan H. Ali Syadikin, Ketua Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 13 Oktober 2008.

perkembangan pembangunan, dan pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan di Dumai.

Pada awalnya (tahun 1920-an), penduduk yang bermukim di Dumai hanya terdiri dari satu suku bangsa Melayu dan jumlah penduduknya pun relatif sedikit.²⁴ Dalam perkembangan selanjutnya yaitu setelah masuknya Jepang pada tahun 1942 dan kemudian Caltex pada tahun 1956, maka kehidupan masyarakat daerah Dumai bertambah ramai dan bersifat heterogen yakni terdiri dari berbagai etnis, antara lain Melayu, Minang, Jawa, Batak, Bugis, Sunda, dan ada juga penduduk Asia lainnya yaitu Cina dan India. Di samping itu, ada juga orang Eropa dan Amerika Serikat yang bekerja di Caltex. Penduduk yang mayoritas di dalam wilayah Kota Dumai adalah etnis Melayu dan merupakan penduduk asli Kota Dumai.²⁵

Menurut data tahun 2001, penduduk Kota Dumai berjumlah 174.465 jiwa dengan kepadatan rata-rata 76 jiwa/km², dan laju pertumbuhan sebesar 2,7% per tahun.²⁶ Komposisi penduduk Kota Dumai berdasarkan etnis pada tahun 2001 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Komposisi Penduduk Kota Dumai Berdasarkan Etnis Pada Tahun 2001

No.	Etnis	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase
1.	Melayu	52.340	30
2.	Minangkabau	33.148	19

²⁴ Jumlah Penduduk Dumai pada waktu itu (1920-an) tidak ditemukan datanya.

²⁵ Wawancara dengan H. Ali Syadikin, Ketua Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 13 Oktober 2008.

²⁶ *Kondisi dan Peluang Investasi Kota Dumai*, op.cit., hal. 21.

3.	Jawa dan Sunda	26.170	15
4.	Batak	22.680	13
5.	Bugis	12.213	7
6.	Cina	6.978	4
7.	Lainnya	20.936	12
Jumlah		174.465	100

Sumber: *BPS Kota Dumai Tahun 2001*

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa etnis Melayu merupakan etnis yang paling banyak terdapat di Kota Dumai dengan jumlah 52.340 jiwa. Selain itu, ada juga etnis Minangkabau, Jawa dan Sunda, Batak, Bugis, dan etnis Cina, serta etnis lainnya, dengan jumlah penduduk yang tidak sama jumlahnya. Etnis Cina yang tinggal di Kota Dumai merupakan etnis yang paling sedikit jumlahnya.

Penduduk Dumai menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Di samping itu, mereka juga berkomunikasi sesama etnis dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Sungguhpun demikian, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Pola kehidupan masyarakat sudah banyak mengalami pembauran antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Bagi masyarakat Melayu sebagai penduduk asli, tidak mempermasalahkan perbedaan sosial dari berbagai etnis yang tinggal di Dumai. Mereka telah berbaur dengan etnis-etnis pendatang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat heterogenitas etnis di Kota Dumai cukup tinggi.²⁷

²⁷ Herdi Salioso, *Kota Dumai: Mutiara Pantai Timur Sumatera* (Pekanbaru: UNRI Press, 2003), hal. 50.

Hal itu juga terlihat dari agama yang dianut masyarakat seperti agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Sungguhpun demikian, mayoritas penduduk Dumai memeluk agama Islam. Sebagai masyarakat yang beragama, kehidupan antar umat beragama di Kota Dumai terjalin dengan relatif harmonis dan rukun.²⁸ Jumlah penduduk Kota Dumai berdasarkan agama tahun 1986²⁹ dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Jumlah Penduduk Kota Dumai Berdasarkan Agama
(Tahun 1986)

No.	Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Islam	80.163
2.	Kristen Protestan	8.548
3.	Kristen Khatolik	5.399
4.	Budha	4.392
5.	Hindu	513
Jumlah		99.015

Sumber: BAPPEDA dan Kantor Statistik Riau Tahun 1987

Pada tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk Kota Dumai beragama Islam yaitu sebesar 80.163 jiwa. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk Melayu beragama Islam dan sebagian etnis lain yang menjadi penduduk Kota Dumai juga beragama Islam, seperti Minangkabau, Batak, Jawa, dan Bugis. Agama Kristen Protestan kebanyakan dianut oleh etnis Batak dengan jumlah penganutnya 8.548 jiwa, agama Kristen Khatolik dianut oleh etnis Cina dan Batak sebanyak 5.399 jiwa, sebagian etnis Cina dan Jawa juga menganut agama Budha yaitu sebanyak 4.392

²⁸ Wawancara dengan H. Ali Syadikin, Ketua Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 13 Oktober 2008.

²⁹ Pemerintah Provinsi Riau, *Sumber dan Potensi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 1986* (Pekanbaru: Kerjasama BAPPEDA dengan Kantor Statistik Riau, 1987), hal. 30.

jiwa. Sedangkan agama yang sedikit jumlah penganutnya adalah agama Hindu yaitu sebanyak 513 jiwa yang dianut oleh etnis Cina dan Jawa.

Guna mengarahkan kehidupan beragama untuk umat dan kepentingan bersama serta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, telah tersedia tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah tempat ibadah di Kota Dumai tahun 1983, 1992 dan 1994.

Tabel 7
Jumlah Tempat Ibadah di Kota Dumai Tahun 1983, 1992 dan 1994

No.	Tahun	Tempat Ibadah			
		Mesjid	Mushalla	Gereja	Vihara
1.	1983	38	53	11	2
2.	1992	58	59	11	2
3.	1994	62	69	12	2

Sumber: *BPS Kabupaten Bengkalis Tahun 1984, 1993 dan 1995*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 1983, 1992 dan tahun 1994, jumlah tempat ibadah di Kota Dumai mengalami perkembangan, kecuali vihara yang tidak mengalami penambahan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah pemeluk agama Budha, sedangkan untuk penganut agama Kong Hu Chu disediakan sebuah Kelenteng.

Secara keseluruhan, perbandingan jumlah penduduk dengan tempat ibadah sudah merata di setiap kecamatan, di mana penduduk Kota Dumai mayoritas beragama Islam. Dengan adanya berbagai aktifitas keagamaan yang dilakukan secara kontiniu, maka tidak ada terjadi konflik antar umat beragama. Hal ini juga tidak lepas dari rasa saling hormat-menghormati antar umat beragama.

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah ketimpangan sosial, kecemburuan sosial dan konflik yang bermuara kepada disintegrasi, maka didirikanlah Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD) pada tanggal 6 Juni 1999 oleh Drs. Nahar Effendi, M. Pd, Muslim Nur, Nurdin Bidin, Effendy Acong, dan Bujang Alwi Saputra.³⁰ Anggotanya terdiri dari 15 etnis yang menjadi penduduk Kota Dumai, yakni Melayu, Minangkabau, Batak, Jawa, Cina, Bugis, Sunda, Minahasa, Bali, Flores, Timor, Sumba, Maluku, Aceh, dan Banjar. Di samping itu, terdapat juga penduduk warga negara asing mengingat Dumai merupakan daerah pelabuhan Caltex. Komposisi penduduk di Kota Dumai didominasi oleh lima kelompok etnis, yaitu Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, dan Cina.³¹ Semua permasalahan yang bisa memicu terjadinya konflik suku, ras dan agama serta permasalahan sosial lainnya dimufakatkan di dalam LKKMD tersebut, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir secepat mungkin

C. Caltex dan Pertumbuhan Kota Dumai

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Dumai tidak terlepas dari peranan yang dimainkan oleh *PT. CPI (Caltex Pacific Indonesia)*. Perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan ini mengeksplorasi minyak bumi yang berada di perut bumi

³⁰ LINTAS, *LKKMD dan Gerakannya: Bersama Bergerak Maju* (Jakarta: Institut Pluralisme Indonesia (IPI), April 2005), hal. 17.

³¹ *Ibid.*, hal. 2.

Riau Daratan. PT. CPI pertama kali didirikan di Indonesia pada awal tahun 1924, sedangkan di Dumai, PT. CPI mulai beroperasi pada tahun 1959.³²

PT. CPI adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Indonesia dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak bumi di Indonesia. Cikal bakal kegiatan Caltex di Indonesia dimulai pada tahun 1934. Pada saat itu Caltex masih bernama (*SOCAL*) *Standard Oil Company of California* (dan akhirnya pada tahun 2005 bernama *Chevron Corporation*), yang memulai kegiatan eksplorasi minyak di Hindia Belanda. Untuk memperluas kegiatannya, pada tahun 1936 SOCAL bergabung dengan perusahaan *Texas Oil Company (Texaco)*, sebuah perusahaan minyak Amerika Serikat. Pada tahun itu juga, SOCAL dan Texaco membentuk sebuah perusahaan patungan di daerah Sumatera Bagian Tengah dengan nama *N. V. Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM)*. Kemudian akhirnya NPPM berubah menjadi *Caltex (California Texas)*.³³

Kegiatan eksplorasi minyak oleh Caltex membuahkan hasil yang besar dengan ditemukannya sumber minyak dan gas di Sebang pada tahun 1940, dan di Duri pada tahun 1941. Kedua ladang minyak ini berada di wilayah Provinsi Riau. Kedua daerah ini (Sebang dan Duri) menjadi wilayah operasi utama Caltex di Indonesia sampai sekarang.

Kegiatan Caltex di Indonesia terhenti selama sekitar satu dasawarsa karena Perang Dunia ke-2 (1939-1945). Pada saat penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang

³² Silva Yuliana, dkk, *op.cit.*, hal. 29.

³³ "Caltex Dalam Peta Perminyakan Indonesia" dalam *Warta Caltex, Nomor 33* (Pekanbaru: Bagian Humas PT. CPI, 1993), hal. 23.

pelabuhan Sungai Pakning sebagai tempat ekspor minyak bumi. Pelabuhan Sungai Pakning terletak di Kota Sungai Pakning, yang termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ekspor minyak bumi di pelabuhan Sungai Pakning mengalami hambatan, karena jarak antara daerah Duri, Minas, Rumbai, dan Bangko dengan pelabuhan Sungai Pakning sangat berjauhan dengan jarak sekitar 80 km sehingga dapat memperlambat proses ekspor minyak bumi. Untuk bisa sampai ke pelabuhan Sungai Pakning, kegiatan ekspor minyak bumi dilakukan dengan menggunakan kapal tanker kecil melalui perairan Sungai Siak.³⁶ Pihak manajemen Caltex sudah berupaya mengatasi permasalahan ini, dan mereka harus mencari pelabuhan yang baru sebagai pengganti pelabuhan Sungai Pakning.

Pada tahun 1956, tim *survey* dari Caltex datang ke Dumai guna melihat lebih dekat kondisi pelabuhan Dumai yang akan dijadikan sebagai pelabuhan ekspor minyak bumi. Pihak Caltex berpendapat bahwa daerah Dumai bisa dijadikan sebagai pelabuhan karena berada pada posisi geografis yang menguntungkan, yang berhadapan dengan Selat Rupat dan dilindungi oleh Pulau Rupat sehingga bisa terhindar dari gelombang Selat Malaka.³⁷ Selain itu, Dumai sebagai pelabuhan minyak bumi terletak di tepi Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional dari Samudera Hindia ke Laut Cina Selatan.

Pada tahun 1956 itu, Caltex masuk ke Dumai membawa perubahan kepada masyarakat. Ketika memulai usahanya jumlah penduduk Dumai adalah 2000 jiwa.

³⁶ Silva Yuliana, dkk, *op.cit.*, hal. 29.

³⁷ *Ibid.*, hal. 30.

(*Oil Yetty*), serta kompleks perumahan dan perbengkelan di Duri dan Dumai. Fasilitas dermaga minyak bumi yang dibangun oleh Caltex terbuat dari konstruksi beton yang disemen.⁴¹

Dalam proyek perluasan itu diselesaikan juga pembangunan jembatan *ponton* melintasi Sungai Siak yang menghubungkan Pekanbaru-Rumbai. Jembatan ini berguna untuk jalur transportasi bagi para pekerja Caltex yang tinggal di Pekanbaru dan untuk kelancaran pengiriman peralatan-peralatan kerja Caltex. Kehadiran jembatan *ponton*, pada tahun 1959 berhasil mewujudkan jalan lintas pulau yang pertama di Sumatera, yang merentang sepanjang 500 km, menghubungkan Kota Padang di Pantai Barat Sumatera (Teluk Bayur) dan Dumai di Pantai Timur Sumatera.⁴²

Pembangunan Dumai mencakup beberapa sektor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pembangunan sarana jalan merupakan hal penting dalam kelancaran arus masuk dan keluar Dumai serta untuk menunjang proyek pembangunan di pelabuhan Dumai. Jalur transportasi yang dapat digunakan menuju ke Dumai adalah melalui jalur darat. Jalur darat ini dapat ditempuh setelah Caltex membangun sarana jalan dari Pekanbaru ke Dumai sepanjang 204 km, yang dapat diselesaikan pada tahun 1958. Sarana jalan ini menghubungkan Dumai dengan Duri, Minas, Rumbai, dan Pekanbaru. Pada masa-masa awal, kondisi jalannya masih kasar dan bertanah. Jalan yang dibangun Caltex tidak menggunakan aspal melainkan

⁴¹ Ahmad Yusuf, dkk, *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942, Jilid 1* (Pekanbaru: Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, 2004), hal. 135.

⁴² "Caltex Dalam Peta Perminyakan Indonesia" dalam *Warta Caltex, Nomor 3* (Pekanbaru: Bagian Humas PT. CPI, 1993), hal. 29.

Jakarta, dan Singapura, dalam kegiatan tugas mereka. Sebelum adanya jalur-jalur transportasi ini terutama jalur darat, jalur satu-satunya yang menghubungkan Dumai adalah melalui laut. Kendaraan yang digunakan dengan jalur laut ini adalah kapal pompong. Pada waktu itu, perjalanan dari Dumai ke Pekanbaru memakan waktu lebih dari satu hari, yaitu dengan menyusuri Selat Rupat dan memasuki perairan Sungai Siak.⁴⁷ Sarana jalan dan perangkat pendukungnya semakin membaik dari tahun ke tahun, dan hubungan antar daerah menjadi lebih mudah dengan adanya sarana penghubung itu.

Pilihan Caltex menjadikan Dumai sebagai pelabuhan minyak buminya sangat tepat, karena wilayah ini tumbuh sedemikian pesatnya. Bagi Caltex, Dumai merupakan daerah yang sangat penting dalam operasional perusahaan. *Support Operations* SBU Dumai bertanggung jawab atas operasi pelabuhan minyak Dumai serta sistem pembangkit tenaga listrik dan transmisi perusahaan sebesar 400 mw, jalan sepanjang 3.800 km, pipa penyalur minyak dan gas sepanjang 900 km dan armada kendaraan sebanyak kurang lebih 2.000 unit.⁴⁸

Tiga bulan setelah Caltex mengukur tanah dan merintis pembangunan di Dumai, maka masyarakat dikumpulkan untuk pemberian ganti rugi kepemilikan tanah. Dari pembicaraan antara pihak Caltex dan masyarakat setempat dipenuhi beberapa kesepakatan: (1) penyediaan listrik untuk masyarakat Dumai dengan dibangunnya tiga buah mesin pembangkit listrik, (2) pembangunan sekolah sebanyak

⁴⁷ Riski, *op.cit.*, hal. 20.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 31.

terjadi pergeseran, yakni pegawai negeri merupakan jenis pekerjaan yang banyak digeluti menggantikan buruh. Sedangkan buruh yang termasuk pertambangan dalam tabel menduduki posisi kedua dan pedagang pada posisi berikutnya.

Para pekerja yang banyak terserap dalam dunia kerja di Dumai kebanyakan berasal dari luar Dumai atau pendatang, sehingga lama-kelamaan terciptalah keberagaman (heterogenitas) ras, agama, suku, dan budaya di Dumai. Orang Melayu sebagai suku asli Dumai kebanyakan bekerja sebagai pekerja kasar atau buruh bawahan. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang kurang memadai untuk mengisi lowongan pekerjaan,⁵⁹ dan para kontraktor biasanya telah memiliki pekerja sendiri sehingga lowongan yang tersedia hanya untuk buruh kasar yang kadang sifatnya harian.⁶⁰ Sementara itu, bekerja sebagai pedagang lebih dikuasai oleh orang Cina dan Minangkabau.

Di samping menyediakan lapangan pekerjaan, Caltex sebagai perusahaan perminyakan yang berlokasi di Dumai juga giat melakukan kebijaksanaan intern perusahaan, yakni dengan jalan terlibat langsung untuk membantu perekonomian dan membina masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat itu siap menerima dan memahami arti kehadiran Caltex dalam lingkungannya.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan H. Ali Syadikin, Ketua Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 14 Oktober 2008.

⁶⁰ *Buruh harian* adalah orang-orang yang direkrut tanpa ikatan kontrak kerja. Buruh ini dipakai hanya selama ada kekurangan dalam pemenuhan tenaga kerja untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, maka mereka akan menjadi pengangguran lagi menjelang dapat pekerjaan baru.

⁶¹ Wawancara dengan Eddy Sudiarto, Pensiunan PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 23 Maret 2009.

Penyiapan masyarakat tersebut sangat penting artinya, sebab bagaimanapun juga budaya industri minyak merupakan suatu sistem nilai baru dalam masyarakat setempat. Hal itu juga disadari oleh para pimpinan Caltex, betapa pentingnya suatu tanggung jawab perusahaan terhadap pembangunan masyarakat sekitarnya sehingga mereka dapat berkembang bersama tumbuhnya perusahaan tersebut. Prinsip semacam ini merupakan pegangan pokok bagi Caltex dalam segala kegiatan operasinya.⁶² Bagi Caltex, pemboran minyak dan pembangunan masyarakat merupakan dua sisi dari sebuah mata uang yang tidak bisa dipisahkan, artinya laju pertumbuhan Dumai bergandengan erat dengan laju pertumbuhan Caltex sendiri.

Kebijaksanaan perusahaan Caltex untuk membantu dan membina masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah operasinya dikenal dengan *Program Human Investment* (Program Investasi Kemanusiaan), yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan *Community Development (CD)* atau pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat tersebut, di antaranya mencakup usaha untuk peningkatan kesejahteraan, pendirian tempat ibadah, peningkatan taraf hidup, membantu memperbaiki lingkungan setempat, dan kemandirian masyarakat daerah Riau yakni memberi latihan ketenagakerjaan kepada pemuda yang putus sekolah.⁶³

Dumai termasuk daerah usaha Caltex dan sudah barang tentu dapat imbas untuk menerima program Caltex tersebut. Awal kehadiran Caltex memiliki imbas yang berharga bagi masyarakat. Tahun-tahun awal kedatangannya, fokus

⁶² "Jembatan Hari Esok" dalam *Warta Caltex* (Pekanbaru: Bagian Humas PT. CPI, 1985), hal. 3.

⁶³ Rita Rosniwati, "Eksistensi PT. Caltex Pasific Indonesia Dalam Pertumbuhan Kota Pekanbaru 1952-1965" *Skripsi Sarjana* (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1993), hal. 30.

pembangunan yang dilakukan Caltex adalah pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana berupa bangunan fisik untuk kebutuhan masyarakat, seperti rumah sakit, klinik, pasar, halte penungguan angkutan, dan jembatan. Sejak tahun 1990-an, fokus pembangunan beralih pada peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Jenis kegiatan yang mendapat perhatian Caltex dalam peningkatan pendapatan masyarakat adalah bidang pertanian, perikanan, dan keterampilan-keterampilan pengolahan makanan, menjahit, otomotif, pensablonan, dan lain-lain.⁶⁴

Rumah sakit dan klinik kesehatan merupakan sebagian dari kebutuhan manusia. Menyadari kenyataan itu, maka ketika Caltex mulai melakukan usaha pertambangannya di Dumai pada tahun 1956, salah satu bangunan yang pertama kali didirikan adalah sebuah rumah sakit, yang terletak di daerah sekitar pelabuhan. Ukuran rumah sakit tersebut masih kecil dan peralatannya pun sederhana serta tenaga medisnyapun masih terbatas. Pada tahun 1980, Rumah Sakit Caltex memiliki 50 orang karyawan, yang terdiri dari satu orang dokter ahli bedah, satu orang dokter ahli penyakit dalam, satu orang dokter ahli penyakit kandungan, dua orang dokter umum, satu orang dokter gigi, satu orang apoteker, dan selebihnya adalah paramedis dan tenaga administrasi. Rumah Sakit Caltex tersebut tidak hanya melayani karyawan Caltex sendiri, masyarakat yang sangat memerlukan bantuan kesehatan juga banyak yang memanfaatkannya.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Roby Fernando, SH, Pegawai Bagian Umum PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 22 April 2009.

⁶⁵ "Jembatan Hari Esok", *op.cit.*, hal. 4.

Berbagai fasilitas juga disediakan perusahaan untuk kesejahteraan karyawannya. Bagi karyawan yang sudah berumah tangga disediakan perumahan, sedangkan bagi karyawan yang masih lajang disediakan kamar penginapan disertai pelayanan makan dan cucian. Air dan listrik disediakan secara cuma-cuma oleh perusahaan untuk perumahan karyawannya.⁶⁶ Caltex juga memberikan bantuan kepada karyawannya dalam rangka Program Rumah Milik, yang termasuk dalam program jangka panjang. Setiap karyawan yang sudah bermasa dinas sekurang-kurangnya satu tahun dapat menjadi peserta program ini, dengan mendapat bantuan pinjaman pembelian tanah, pembangunan rumah, dan biaya sarana perkotaan seperti sumur, tanki limbah, aliran listrik, selokan, jembatan, dan jalan.⁶⁷

Di samping rumah, pengangkutan juga merupakan kebutuhan vital. Menyadari akan pentingnya pengangkutan, khususnya dalam rangka kelancaran kerja, maka perusahaan Caltex menyediakan beberapa bis untuk antar jemput karyawan yang tinggalnya jauh dari lokasi kerja. Pengadaan bis juga memberi manfaat ganda, karena beberapa perusahaan angkutan nasional dikontrak oleh Caltex, antara lain Batang Kampar, Sinar Riau, Cahaya Riau, dan Bumi Langoan. Selain memenuhi kebutuhan karyawannya dalam bidang angkutan, secara tidak langsung Caltex juga ikut membantu kehidupan dan perkembangan perusahaan nasional, dan

⁶⁶ Wawancara dengan Ir. Zainal Arifin, Pegawai Bagian sarana dan Prasarana PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 20 April 2009.

⁶⁷ "Jembatan Hari Esok", *op.cit.*, hal. 5.

perusahaan nasional bersangkutan berkesempatan juga memberi pekerjaan kepada para karyawannya.⁶⁸

Untuk memperlancar pendidikan anak-anak para karyawan dan masyarakat setempat, perusahaan juga menyediakan beasiswa dan membangun sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Beasiswa ini diberikan kepada anak-anak yang berprestasi. Bentuk beasiswa sangat bervariasi, mulai dari pembayaran uang sekolah sampai pemberian biaya penuh untuk sekolah di Luar Negeri selama lima tahun. Selain beasiswa, perusahaan juga menyediakan transportasi berupa bus untuk mengantar dan menjemput anak-anak sekolah.⁶⁹

Pada tahun 1980, Perusahaan Caltex juga ikut membangun gedung-gedung sekolah yang pengelolaannya kemudian dilakukan oleh pemerintah atau yayasan pendidikan. Ada tujuh buah Sekolah Dasar (SD), dua Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dibantu oleh Caltex. Agar gedung-gedung sekolah itu siap digunakan, Caltex melengkapinya dengan sarannya, seperti: bangku sekolah, papan tulis, ruang guru dengan segala peralatannya, ruang laboratorium dengan segala perlengkapannya, ruang perpustakaan dan buku-bukunya, ruang olahraga, dan lain-lainnya. Pembangunan sekolah-sekolah itu merupakan wujud kepedulian sosial Caltex dan ternyata sangat bermanfaat bagi masyarakat.

⁶⁸ "Jembatan Hari Esok", *op.cit.*, hal. 6.

⁶⁹ Wawancara dengan Ir. Zainal Arifin, Pegawai Bagian Sarana dan Prasarana PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 20 April 2009.

Sekolah itu tidak hanya disediakan untuk anak-anak karyawan Caltex, tapi juga untuk anak-anak warga pemukiman penduduk setempat.⁷⁰

Fasilitas olahraga dan rekreasi juga disediakan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk, antara lain *staff-club*, restoran, lapangan golf, *bowling centers*, lapangan tenis, *fitness center*, kolam renang, lapangan atletik, perpustakaan dan gedung bioskop. Perusahaan menyediakan biaya yang besar untuk memelihara fasilitas itu. Fasilitas lain yang disediakan oleh perusahaan adalah pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama yakni satu buah mesjid dan dua buah gereja. Caltex juga membangun supermarket. Supermarket dikelola oleh kontraktor untuk menyediakan berbagai barang kebutuhan karyawan dengan harga yang dikontrol oleh perusahaan.⁷¹

Pada tahun 1959 Caltex telah membangun pasar, stasiun bis dan oplet, klinik dan rumah sakit, perumahan tempat tinggal, sumur air bersih, dan lain sebagainya di Kota Dumai. Caltex juga membangun Kantor Kepolisian, Kantor Bea Cukai, dan Kantor Imigrasi. Dengan dibangunnya Kantor Kecamatan oleh Caltex, maka Ibukota Kecamatan Batu Panjang yang berada di Pulau Rupat dipindahkan ke Dumai. Selanjutnya, Caltex juga menyumbang pembangunan 31 rumah untuk para pejabat pemerintah di Dumai.⁷²

Keberadaan Caltex di Dumai membawa dampak bagi lingkungannya karena diharapkan lingkungan itu dapat tumbuh sejalan dengan pertumbuhan Caltex sendiri. Perhatian dan bantuan yang diberikan Caltex tidak hanya terbatas pada satu bidang

⁷⁰ "Jembatan Hari Esok", *op.cit.*, hal. 14.

⁷¹ *Loc.cit.*, hal. 16.

⁷² *Loc.cit.*, hal. 23.

saja, tetapi mencakup banyak bidang kegiatan. Saham PT. CPI dimiliki sepenuhnya oleh Chevron dan Texaco yang berpusat di Amerika Serikat. Pada tahun 1963 kepemilikan sahamnya 50% dipegang oleh Chevron dan 50% lagi dimiliki oleh Texaco.⁷³

Pembagian keuntungan perusahaan dari tahun 1984 hingga tahun 2000 didasarkan pada rasio pembagian keuntungan 88% untuk Pemerintah Indonesia dan 12% untuk Caltex. Pada tahun 2001 pembagian keuntungan ini menjadi 90% untuk Pemerintah Indonesia dan 10% untuk Caltex. Pembagian keuntungan itu beragam polanya pada masa lampau, seperti pada zaman Hindia Belanda, Caltex membayar royalti pada pemerintah berdasarkan jumlah minyak yang mereka peroleh. Kemudian antara tahun 1963 sampai tahun 1983 pembagian didasarkan pada kontrak karya. Pada sistem ini kekayaan perusahaan adalah milik Caltex dan manajemen adalah hak prerogatif perusahaan. Caltex hanya melaporkan pada Pemerintah Indonesia hal-hal yang akan dia lakukan. Pada sistem kontrak karya, pembagian keuntungan adalah 65% untuk pemerintah Indonesia dan 35% untuk Caltex. Pada tahun 1983 kontrak kerja berubah menjadi kontrak *Production Sharing*. Pada sistem kontrak ini manajemen tidak lagi menjadi prerogatif Caltex tetapi menjadi hak Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Pertamina. Demikian pula dengan kekayaan perusahaan menjadi milik Pertamina.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Roby Fernando, SH, Pegawai Bagian Umum PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 22 April 2009.

⁷⁴ Wawancara dengan Roby Fernando, SH, Pegawai Bagian Umum PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 22 April 2009.

Pada tahun 2005, Caltex sebagai anak perusahaan Chevron dan Texaco Inc, diakuisisi oleh Chevron bersama dengan Texaco dan Unocal. Dengan demikian, nama PT. Caltex Pacific Indonesia resmi berubah menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia. Kegiatan operasional PT. CPI terbagi pada empat wilayah yakni Kantor Pusat berada di Jakarta, yang dikoordinasikan oleh seorang Wakil Managing Director. Kantor Operasi Rumbai yang menangani masalah operasi, yang dikoordinasikan oleh seorang Executive Vice President & Managing Director. Kantor Produksi Duri yang menangani masalah produksi minyak. Pusat kegiatan keempat adalah di Kantor Penyimpanan dan Pengapalan Minyak yang berada di Dumai. Seluruh kegiatan PT. CPI dipimpin oleh Ketua Dewan Direksi yang berkedudukan di Kantor Pusat, Jakarta.⁷⁵

PT. CPI dengan demikian merupakan perusahaan modal asing, maka karyawannya terdiri atas orang pribumi dan orang asing. Karyawan asing mendapat perlakuan yang lain daripada perlakuan terhadap karyawan Indonesia, dalam arti fasilitas yang mereka peroleh jauh lebih baik. Pada umumnya para karyawan asing adalah para teknisi di bidang perminyakan yang tenaganya sangat dibutuhkan. Pada umumnya pegawai PT. CPI terdiri atas pegawai tetap yang diangkat setelah mereka lulus masa percobaan selama tiga bulan. Dalam kasus ini, perusahaan memerlukan

⁷⁵ Wawancara dengan Roby Fernando, SH, Pegawai Bagian Umum PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 22 April 2009.

tenaga yang sifatnya untuk sementara (misalnya tenaga medis), statusnya adalah pegawai tidak tetap yang dikontrakkan untuk masa kerja tertentu.⁷⁶

Selain adanya pegawai golongan tetap, ada juga pegawai tidak tetap yang bekerja berdasarkan kontrak. Pegawai kelompok terakhir ini dalam bekerja dipimpin oleh penyelia PT. CPI dan bertanggungjawab kepadanya. Pegawai kontraktor tidak menerima gaji dari PT. CPI, melainkan dibayar oleh pihak kontraktor.⁷⁷

Kompensasi yang diberikan kepada karyawan atas tenaga dan pikiran yang dicurahkan pada pekerjaan terdiri atas gaji, tunjangan dan berbagai fasilitas. Gaji yang diberikan pada karyawan didasarkan pada gaji pokok yang jumlahnya ditinjau setiap setahun sekali. Dalam sepuluh tahun terakhir ini kenaikan reguler gaji pegawai adalah sebesar 5% dari gaji pokok setahun. Selain kenaikan gaji reguler tersebut, karyawan juga memperoleh tambahan kenaikan gaji yang jumlahnya didasarkan pada prestasi kerja masing-masing karyawan. Jumlah gaji tambahan ini dibatasi oleh ketentuan gaji maksimum untuk masing-masing klasifikasi yakni sebesar Rp. 5.000.000 sejak tahun 1987. Sementara itu Tunjangan Hari Raya para karyawan diberikan sebanyak satu bulan gaji pokok.

Penerimaan karyawan dilakukan setiap tahun dengan melalui test kemampuan dan keterampilan. Sistem penggajian yang dilaksanakan oleh Caltex adalah menurut tingkat pendidikan, tingkat keahlian, dan lamanya para karyawan bekerja di sana. Contohnya: karyawan yang hanya tamatan SMK mendapatkan gaji sebesar Rp.

⁷⁶ Djamaludin Ancok, *op.cit.*, hal. 28.

⁷⁷ Wawancara dengan Hendrik, SH, Pegawai Bagian Kesejahteraan Karyawan PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 21 April 2009.

2.000.000/bulan, sedangkan yang tamatan perguruan tinggi (S1) mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000/bulan. Para karyawan yang memiliki tingkat keahlian lebih tinggi dari yang lainnya mendapatkan gaji sebesar Rp. 7.000.000/bulan, sedangkan yang memiliki keahlian rendah atau sedang-sedang saja mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000/bulan. Bagi karyawan yang sudah lama bekerja di Caltex yakni paling kurang 10 tahun mendapatkan gaji sebesar Rp. 15.000.000/bulan, sedangkan yang kurang dari 10 tahun tetap mendapatkan seperti semula.⁷⁸

Ketentuan gaji maksimum ini menimbulkan masalah bagi karyawan yang tidak bisa naik klasifikasi karena tidak tersedianya posisi kerja untuk klasifikasi yang lebih tinggi. Ketentuan gaji maksimum ini akan menyebabkan jumlah gaji tambahan yang didasarkan pada prestasi kerja semakin mengecil dari tahun ke tahun. Kenaikan yang semakin mengecil ini dilakukan agar gaji yang diterima tidak melampaui ketentuan jumlah gaji maksimum untuk setiap klasifikasi. Ketentuan yang demikian ini menjadi faktor yang kurang menggairahkan bagi karyawan untuk bekerja. Karyawan yang telah mencapai usia tertentu akan berhenti bekerja dan mendapat uang penghasilan dari pensiun.⁷⁹

Perusahaan juga memberikan tunjangan uang tunai pada karyawan yang bekerja di daerah terpencil yakni sebesar Rp. 2.000.000 per bulan. Selain tunjangan uang tunai, perusahaan juga memberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk mereka yang tidak menempati perumahan, yang disediakan oleh

⁷⁸ Wawancara dengan Hendrik, SH, Pegawai Bagian Kesejahteraan Karyawan PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 31 Mei 2010.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 32.

perusahaan. Tunjangan perumahan dapat berupa kesempatan untuk membangun rumah atas bantuan perusahaan. Tunjangan lain yang diberikan adalah tunjangan cuti dan hari libur. Karyawan dapat menikmati hari libur dengan gaji tetap dibayarkan. Hari libur tersebut meliputi hari libur resmi pemerintah, cuti tahunan, dan beberapa hari libur yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan untuk berbagai urusan seperti pernikahan, kelahiran anak, naik haji, dan lain-lain.⁸⁰

Selain tunjangan tersebut di atas, karyawan juga menerima tunjangan bagi yang mengalami sakit berkepanjangan, melahirkan anak dan kematian. Tunjangan ini memberi peluang kepada karyawan yang menderita sakit berkepanjangan untuk terus mendapat gaji penuh. Selain itu, sejumlah uang tunai juga diberikan kepada karyawan yang tidak bisa meneruskan pekerjaannya di perusahaan karena penyakit yang serius. Besarnya jumlah uang tunai yang diberikan didasarkan pada masa kerja karyawan. Tunjangan juga diberikan kepada karyawan yang meninggal dunia. Keluarga yang ditinggalkan memperoleh sejumlah uang untuk meringankan penderitaan akibat kehilangan anggota keluarga yang menjadi sumber penghasilan.⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan Hendrik, SH, Pegawai Bagian Kesejahteraan Karyawan PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 21 April 2009.

⁸¹ Wawancara dengan Hendrik, SH, Pegawai Bagian Kesejahteraan Karyawan PT. CPI Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 21 April 2009.

BAB III

KOTA DUMAI 1999-2005

A. Pemerintahan Kota Dumai: Dari Kota Administratif Sampai Menjadi Kota Otonom

Pada awalnya Dumai berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Pada saat itu Dumai masih berstatus sebagai daerah kecamatan (dari tahun 1959 sampai tahun 1979), dengan luas wilayah sekitar 1.727 km². Kecamatan Dumai terdiri dari delapan desa, yaitu Desa Tanjung Palas, Desa Teluk Makmur, Desa Pelintung, Desa Guntung, Desa Bagan Besar, Desa Lubuk Gaung, Desa Basilam Baru, dan Desa Batu Teritip. Pada saat status Dumai ditingkatkan menjadi Kota Administratif (Kotif)¹ pada tahun 1979, luas wilayah Dumai diperkecil menjadi 184,58 km². Yang menjabat sebagai walikota pertama kali adalah Drs. H. Wan Dahlan Ibrahim dari tahun 1979-1983.²

Pengurangan luas wilayah ini disebabkan karena ada beberapa daerah bekas wilayah Kecamatan Dumai seperti Desa Bagan Besar, Bukit Kapur, Lubuk Gaung, Basilam Baru, Kayu Kapur, dan Batu Teritip, yang digabungkan ke dalam pemerintahan Kecamatan Bukit Kapur, sedangkan bekas wilayah Kecamatan Dumai lainnya seperti Desa Pelintung, Teluk Makmur dan Guntung digabungkan ke dalam pemerintahan Kecamatan Bukit Batu. Kedua kecamatan ini statusnya tetap berada di

¹ Kota Administratif adalah sistem pemerintahan untuk daerah kota, di mana kedudukan lembaga legislatif Kota Administratif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berada di ibukota kabupaten. Pemerintahan Kota Administratif adalah pemerintahan daerah tingkat II yang berada di bawah pemerintahan kabupaten. Pemerintahan Kota Administratif dipimpin oleh walikota yang dibantu oleh wakil walikota, dan kedudukannya berada di bawah bupati.

² Bagian Humas Pemerintah Kota Dumai, *Profil Kota Dumai* (Dumai: Pemerintah Kota Dumai, 2007), hal. 10.

bawah pemerintahan Kabupaten Bengkalis serta terpisah dari wilayah pemerintahan Kota Administratif Dumai.³

Kota Administratif Dumai mempunyai dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Timur. Kecamatan Dumai Timur membawahi enam kelurahan yakni: Kelurahan Dumai Kota, Kelurahan Buluh Kasap, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Teluk Binjai, Kelurahan Jaya Mukti, Kelurahan Tanjung Palas. Adapun Kecamatan Dumai Barat terdiri dari Kelurahan Datuk Laksamana, Kelurahan Rimba Sekampung, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kelurahan Purnama, Kelurahan Bukit Datuk, dan Kelurahan Bukit Timah.⁴

Setelah menjadi Kota Administratif Dumai selama 20 tahun (1979-1999), Kota Dumai menunjukkan peningkatan atau kemajuan dalam berbagai bidang. Atas dasar kemajuan itulah maka Kota Administratif Dumai dikembangkan menjadi Pemerintahan Kota,⁵ dengan walikota Drs. Zainuddin Abdullah (1999-2000), Drs. H. Wan Syamsir Yus (2000-2005), dan Drs. Zulkifli. AS, M. Si (2005-sekarang).⁶ Konsekuensi dari perubahan status Dumai menjadi pemerintahan kota yakni Dumai melaksanakan otonomi daerah dan penambahan luas wilayah, dengan luas wilayah Dumai dari 184,58 km² kemudian menjadi 1.727,38 km². Pada saat Dumai menjadi

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai, Pasal 5.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai, Pasal 6.

⁵ Pemerintahan Kota adalah sistem pemerintahan untuk daerah kota, di mana kedudukan lembaga legislatifnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II berada di bawah DPRD tingkat I provinsi. Struktur pemerintahan kota berada di bawah pemerintahan provinsi atau pemerintahan daerah tingkat I dan menjadi pemerintahan daerah tingkat II. Pemerintahan kota sejajar dengan pemerintahan kabupaten yang berada di bawah pemerintahan provinsi. Dalam pemerintahan kota, pejabat yang memegang jabatan untuk mengendalikan pemerintahan adalah walikota yang dibantu oleh wakil walikota serta statusnya berada di bawah gubernur. Kedudukan walikota sama dengan bupati.

⁶ *Profil Kota Dumai*, op.cit., hal. 10.

pemerintahan kota pada tanggal 27 April 1999, beberapa desa dari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis digabungkan ke dalam wilayah pemerintahan Kota Dumai.⁷

Wilayah pemerintahan Kota Dumai yang sebelumnya terdiri dari dua kecamatan dan 12 kelurahan, kemudian dimekarkan pada tahun 2001⁸ dengan menambah tiga kecamatan lagi, yang terdiri dari Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, dan Sungai Sembilan, serta penambahan 20 kelurahan lagi, yang terdiri dari Kelurahan Bumiayu, Bagan Keladi, Ratu Sima, Simpang Tetap Darul Ichsan, Mekar Sari (masuk dalam Kecamatan Dumai Barat), Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur, Gurun Panjang, Bagan Besar (Kecamatan Bukit Kapur), Teluk Makmur, Mundam, Guntung, Pelintung (Kecamatan Medang Kampai), Lubuk Gaung, Tanjung Penyembal, Bangsal Aceh, Basilam Baru, dan Batu Teritip (Kecamatan Sungai Sembilan), Bintan, Bukit Bathrem (Kecamatan Dumai Timur).⁹ Akhirnya jumlah kecamatan yang ada di Kota Dumai sampai tahun 2005 menjadi lima buah kecamatan dengan 32 buah kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Nama-nama Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Dumai
Tahun 2001

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1.	Bukit Kapur	1. Bukit Nenas 2. Bukit Kayu Kapur 3. Gurun Panjang 4. Bagan Besar

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, Pasal 3.

⁸ Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 2002), hal. 13

⁹ Ibid., Pasal 3 dan 4.

2.	Medang Kampai	1. Teluk Makmur 2. Mundam 3. Guntung 4. Pelintung
3.	Sungai Sembilan	1. Bangsal Aceh 2. Batu Teritip 3. Basilam Baru 4. Lubuk Gaung 5. Tanjung Penyembal
4.	Dumai Barat	1. Bagan Keladi 2. Bukit Timah 3. Bukit Datuk 4. Bumi Ayu 5. Datuk Laksamana 6. Mekar Sari 7. Purnama 8. Pangkalan Sesai 9. Rimba Sekampung 10. Ratu Sima 11. Simpang Tetap Darul Ichsan
5.	Dumai Timur	1. Bukit Bathrem 2. Buluh Kasap 3. Bintan 4. Dumai Kota 5. Jaya Mukti 6. Sukajadi 7. Tanjung Palas 8. Teluk Binjai

Sumber: *Kantor Walikota Dumai Bagian Pemerintahan*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelurahan yang ada di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur mengalami penambahan. Kelurahan di Kecamatan Dumai Barat ditambah sebanyak lima buah, yang terdiri dari Kelurahan Bagan Keladi, Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Mekar Sari, Kelurahan Ratu Sima, dan Kelurahan Simpang

Tetap Darul Ichsan. Adapun kelurahan di Kecamatan Dumai Timur ditambah sebanyak dua buah terdiri dari Kelurahan Bukit Bathrem dan Kelurahan Bintan.

Di dalam melaksanakan tugasnya, ada tiga organisasi perangkat staf pemerintahan daerah, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO), dan Badan Pengawas. Sekretaris Daerah membawahi tiga asisten dan delapan bagian,¹⁰ yaitu:

- a. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - 1. Bagian Pemerintahan
 - 2. Bagian Pertanahan
 - 3. Bagian Hukum
 - 4. Bagian Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi
- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1. Bagian Perekonomian
 - 2. Bagian Sosial dan Pemberdayaan
 - 3. Bagian Pembangunan Perkotaan
- c. Asisten Administrasi, membawahi:
 - 1. Bagian Perlengkapan
 - 2. Bagian Keuangan
 - 3. Bagian Administrasi dan Protokoler

Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) di samping bertugas secara teknis, juga mengkoordinir dan mengintegrasikan usaha, penyusunan rencana dan program kerja. Badan Pengawas Kota Dumai merupakan unsur pengawas dengan

¹⁰ *Profil Kota Dumai, op.cit.*, hal. 12.

tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.¹¹

Semenjak Dumai dibentuk pada tanggal 11 Juli 1979 sebagai Kota Administratif Dumai hingga dibentuk menjadi Kota Dumai pada tanggal 27 April 1999 sampai tahun 2005, Kota Dumai telah dipimpin oleh tujuh orang walikota yang juga merangkap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Dumai. Semua walikota ini dilantik oleh gubernur yang juga merangkap sebagai Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Riau. Adapun nama-nama pejabat yang pernah menjabat sebagai Walikota Dumai sejak tahun 1979-sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Nama-nama Pejabat Walikota Dumai Sejak Tahun 1999 – Sekarang

No.	Nama Pejabat	Masa Jabatan (Tahun)
1.	Walikota Administratif 1. Drs. H. Wan Dahlan Ibrahim 2. Drs. H. Rusli Idar 3. H. Fadlah Sulaiman, SH 4. Drs. H. Azwan Yacob 5. Drs. H. Zainuddin Abdullah	 1979 – 1983 1983 – 1985 1985 – 1990 1990 – 1994 1994 – 1999
2.	Walikota 1. Drs. Zainuddin Abdullah 2. Drs. H. Wan Syamsir Yus 3. Drs. Zulkifli. AS, M. Si	 1999 – 2000 2000 – 2005 2005 – Sekarang

Sumber: *Bagian Pemerintahan Kantor Walikota Dumai*

¹¹ *Ibid.*, hal. 12.

B. Pertumbuhan Penduduk dan Perekonomian Dumai

Perkembangan Dumai dari sebuah desa nelayan menuju sebuah kota seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan ekonomi dan industri, serta kegiatan kehidupan lainnya menuntut adanya penataan yang lebih baik. Kegagalan atau keterlambatan dalam penataan kota berakibat pada ketidaknyamanan dan gangguan yang pada akhirnya menurunkan produktifitas warganya.¹² Sebagai landasan operasional dalam melaksanakan misi pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjadikan Kota Dumai sebagai pusat pelayanan di Pantai Timur Sumatera, maka rencana komprehensif untuk mewujudkan sebuah kota yang tertata dengan baik dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memantapkan tata ruang Kota Dumai, yang ditempuh melalui usaha:
 - (a) Menyusun kembali tata ruang wilayah dengan Kota Dumai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang Pantai Timur Sumatera yang ditetapkan secara bersama-sama oleh semua komponen daerah melalui Peraturan Daerah.
 - (b) Menata Kota Dumai sebagai wilayah pusat pengembangan Dumai sebagai kawasan ekonomi terpadu, yang didukung oleh Kota Duri, Bengkalis, Siak, Bagan Batu, dan Bagan Siapi-api sebagai daerah hinterland-nya.

¹² Muhammad Ikhsan, *Menata Kota Kita: Harapan Untuk Kota Dumai* (Provinsi Riau: Jurnal Industri dan Perkotaan Vol. 5 Nomor 9/ Agustus 2001), hal. 55.

- (c) Mempercepat pembangunan kawasan industri di Kota Dumai yaitu di pelintung dan Lubuk Gaung dengan mempersiapkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (d) Mengembangkan kawasan wisata Hutan Wisata Dumai, Kawasan Wisata teluk Makmur dan Bukit Pelintung.
- (e) Menata kembali terhadap penguasaan lahan.
- (f) Menata jaringan drainase perkotaan dan lingkungan pemukiman.¹³

2. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agroindustri, melalui kegiatan usaha:

- (a) Mendorong pembangunan industri yang berorientasi agribisnis dan agroindustri pada wilayah hinterland Kota Dumai.
- (b) Memperluas jaringan pemasaran produksi usaha kecil dan menengah serta koperasi melalui pengembangan informasi pasar dan informasi teknis lainnya.
- (c) Mengembangkan penganekaragaman hasil olahan produksi komoditi pertanian.
- (d) Memberdayakan kelompok marginal yaitu keluarga prasejahtera dan sejahtera I, dengan pola pendampingan kegiatan oleh Lembaga Swadaya dan bantuan modal usaha, peralatan, dan sebagainya.
- (e) Menyiapkan koperasi untuk mengkoordinir kegiatan petani dalam permodalan, produksi dan pemasaran secara professional.

¹³ Wan Syamsir Yus dan Herdi Salioso, *Comparative Advantage Kota Dumai Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Provinsi Riau* (Pekanbaru: UNRI Press, 2002), hal. 47.

- (f) Menyiapkan tenaga penyuluh pertanian/ industri yang professional dan memiliki komitmen pembangunan yang tinggi untuk membantu petani/ pengrajin/ pengusaha industri kecil.¹⁴

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan kegiatan:

- (a) Membangun pusat-pusat pendidikan formal dan pusat pelatihan keterampilan dengan meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana pendidikan meliputi pembangunan laboratorium, meningkatkan daya tampung sekolah, fasilitas pendukung sekolah dan membangun sekolah-sekolah unggulan.
- (b) Mendorong dunia usaha besar untuk mendirikan pelatihan-pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyiapan tenaga kerja terampil, professional dan siap pakai.
- (c) Mempersiapkan Peraturan daerah untuk memprioritaskan pemakaian tenaga tempatan sehingga rasio tenaga kerja dengan tenaga kerja pendatang pada setiap perusahaan mempunyai perbandingan yang ideal untuk semua level manajemen.
- (d) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan amanah serta menitikberatkan kepada "Pelayanan prima" kepada masyarakat.
- (e) Menyempurnakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 48.

- (f) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik pada tingkat dasar dan menengah.
 - (g) Menyeimbangkan distribusi tenaga pendidik pada tingkat dasar dan menengah.
 - (h) Memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 - (i) Mempertinggi tingkat profesionalisme tenaga para medis maupun non medis.
 - (j) Mengoptimalkan fungsi dan peningkatan status institusi pelayanan kesehatan masyarakat.
 - (k) Mengoptimalkan profesionalisme pengelola institusi pelayanan kesehatan.
 - (l) Membina pengobatan tradisional yang professional dan bersertifikat uji klinis.
 - (m) Membentuk perusahaan daerah di mana modalnya berasal dari pemerintah daerah atau *joint venture* dengan swasta nasional, modal asing atau modal pihak ketiga.¹⁵
4. Membangun jaringan infrastruktur pendukung ekonomi, melalui kegiatan:
- (a) Menyelesaikan pembangunan ruas jalan Dumai - Sungai Pakning.
 - (b) Menyelesaikan peningkatan ruas jalan Dumai - Batu Teritip - Bagan Siapi-api.
 - (c) Mengoptimalkan pelabuhan samudera Dumai.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 49.

- (d) Peningkatan status Bandar Udara pinang Kampai Dumai untuk menjadi Bandar Udara Komersial.
 - (e) Mendorong upaya pembangunan jalan kereta api Dumai - Sumatera utara dan Dumai - Pekanbaru.
 - (f) Mendorong agar percepatan pembangunan jalan tol Dumai - Pekanbaru terealisasi.
 - (g) Meningkatkan penyediaan air bersih di Kota Dumai.
 - (h) Mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi yang merata pada kawasan pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai.¹⁶
5. Meningkatkan kegiatan investasi swasta, melalui kegiatan:
- (a) Melakukan promosi investasi di dalam dan luar negeri.
 - (b) Memanfaatkan investasi yang bernuansa ramah lingkungan serta bermitra dengan kelompok masyarakat.
 - (c) Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan jaminan hukum.
 - (d) Membangun jaringan informasi pasar.
 - (e) Mendorong investasi untuk memanfaatkan secara optimal pelabuhan Kota Dumai.¹⁷
6. Meningkatkan pelaksanaan otonomi, melalui upaya:
- (a) Memberdayakan Kota Dumai sebagai daerah otonom yang dapat berfungsi dengan baik.
 - (b) Meningkatkan sumber penerimaan dan pengelolaan kekayaan daerah.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 50.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 50.

- (c) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga legislatif.
- (d) Membangun sikap dan perilaku penyelenggara pemerintahan yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- (e) Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (f) Mendorong terbentuknya lembaga teknis, seperti lembaga penelitian daerah dan lembaga lainnya yang berasal dari kalangan professional dan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu guna membantu pemerintah daerah.¹⁸

7. Mengaktualisasikan nilai budaya tempatan dengan upaya:

- (a) Mengapresiasikan nilai-nilai budaya tempatan dalam kehidupan masyarakat.
- (b) Mengembangkan kreatifitas seni budaya tempatan sebagai sumber jati diri.
- (c) Mengakselerasi proses pembauran nilai budaya dalam masyarakat yang heterogen.
- (d) Memperkokoh rasa solidaritas, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial.¹⁹

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif bagi pengembangan nasional, apabila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik. Pertumbuhan penduduk yang pesat, sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan serta kesejahteraan

¹⁸ *Ibid.*, hal. 51.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 51.

secara layak dan merata. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar belum tentu memiliki kualitas yang tinggi, dan untuk mewujudkan penduduk yang besar dan berkualitas tinggi perlu pembinaan yang sangat tinggi juga. Program kependudukan di Kota Dumai, seperti halnya di daerah-daerah lainnya meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, penjagaan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang, urbanisasi, serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pengembangan yang harus ditingkatkan.

Pada awal dibentuknya Pemerintahan Kota Dumai (1999), penduduknya berjumlah 156.966 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km². Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000, jumlah penduduk telah meningkat menjadi 174.706 jiwa. Jika dilihat pertumbuhan penduduk Kota Dumai dalam satu tahun setelah menjadi kota, jumlahnya meningkat lebih kurang 11,3%.²⁰ Peningkatan ini disebabkan karena adanya pengembangan pembangunan dan industri di Kota Dumai, dan pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Dumai, serta banyaknya jumlah masyarakat pendatang yang datang ke Kota Dumai pada tahun-tahun ini. Untuk lebih jelasnya, pertumbuhan penduduk Kota Dumai dari awal berdiri sebagai Kota tahun 1999 sampai tahun 2005 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

²⁰ *Dumai Dalam Angka* (Dumai: BPS, 2001), hal. 45.

Tabel 11
Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 1999 – 2005

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	1999	156.966
2.	2000	174.706
3.	2001	178.125
4.	2002	190.457
5.	2003	215.761
6.	2004	215.648
7.	2005	215.957

Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 1999, 2001, 2003, dan 2005

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu 1999-2005 jumlah penduduk di Kota Dumai mengalami penambahan, tetapi pada tahun 2004 penduduk Kota Dumai tidak mengalami pertumbuhan melainkan jumlah penduduknya berkurang dari tahun 2003 sekitar 0,51%. Hal ini disebabkan karena banyaknya angka kematian ibu dan bayi akibat dari kekurangan gizi. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kota Dumai kembali bertambah dengan persentase pertumbuhan 0,6%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Dumai dari tahun 1999 sampai tahun 2005 adalah sebesar 5,59%.

Adapun jumlah penduduk menurut agama di Kota Dumai dari tahun 1999-2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12
Jumlah Penduduk Kota Dumai Menurut Agama dari Tahun 1999-2005
(dalam Jiwa)

No.	Tahun	Islam	Kristen Protestan	Kristen Khatolik	Budha	Hindu
1.	1999	71.450	40.743	35.654	8.102	1.017
2.	2000	75.654	44.786	39.087	10.585	4.594
3.	2001	77.376	46.495	40.564	10.860	2.830
4.	2002	80.621	47.980	42.957	13.986	4.913
5.	2003	91.985	52.968	46.898	18.654	5.256
6.	2004	92.525	53.560	47.876	16.564	5.124
7.	2005	93.948	54.986	49.987	11.549	5.487

Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2006

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat pengurangan jumlah penduduk dari agama Budha dan Hindu. Hal ini disebabkan terdapatnya arus keluar yang banyak pada kedua agama ini. Mereka memilih untuk pergi merantau ke negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, yang mempunyai daerah otonomi sendiri. Dalam perkembangannya, Kota Dumai memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Dalam pertumbuhan perekonomian Kota Dumai yang sesuai dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Dumai atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tanpa migas mulai tahun 1999 terdiri dari beberapa sektor perekonomian. Sektor perekonomian yang berpengaruh besar dalam pertumbuhan perekonomian Kota Dumai ada empat jenis, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bangunan, dan sektor jasa.

Jika dilihat PDRB Kota Dumai atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tanpa migas pada tahun 1999 adalah sebesar Rp. 553.202,88 juta, yang terdiri

dari Rp. 156.052,82 juta dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, Rp. 137. 709,56 juta dari sektor pengangkutan dan komunikasi, Rp. 100.106,08 juta dari sektor bangunan, dan Rp. 81.962,20 juta dari sektor jasa. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 77.371,42 juta berasal dari sektor-sektor lainnya, yang hanya sedikit memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Dumai.²¹

Dari hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sektor yang berpengaruh dalam pertumbuhan perekonomian Kota Dumai adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bangunan, dan sektor jasa. Sektor lainnya hanya sebagai penunjang, seperti sektor pertanian dan perkebunan.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai atas dasar harga berlaku menurut usaha tanpa migas dari tahun 1999-2000 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13
PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Usaha Tanpa Migas dari Tahun 1999-2000

No.	Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)
1.	1999	553.202,88 juta
2.	2000	563.643,21 juta
3.	2001	1.017,68
4.	2002	1.061,96
5.	2003	1.170,06
6.	2004	1.271,45
7.	2005	1.369,82

Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2006

Pertumbuhan perekonomian Kota Dumai dari tahun 1999 ke tahun 2000 tidak mengalami peningkatan yang berarti, tetapi pada tahun selanjutnya mengalami

²¹ Pemerintah Provinsi Riau, *Pendapatan Regional Kabupaten/ Kota Menurut Lapangan Usaha 1997-1999* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2000), hal. 212.

pertumbuhan yang sangat baik untuk menunjang perkembangan suatu kota. Pada tahun 2002, dari sektor pertanian saja memberikan kontribusi sebesar Rp. 103,28 juta.

Indikator ekonomi makro berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Dumai yang terus meningkat tiap tahunnya sejak tahun 2000-2005 merupakan gambaran keberhasilan pembangunan perekonomian di Kota Dumai. Untuk mendukung peningkatan PDRB tersebut maka titik berat pembangunan ekonomi Kota Dumai adalah dengan mempertahankan dominasi pembangunan pada sektor industri, perdagangan, angkutan serta bangunan, di samping mempertahankan sektor pertanian sebagai penghasil bahan baku industri. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat juga telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kota Dumai sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

C. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kota Dumai

a. Pasar

Pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi yang sangat penting pada sebuah kota, karena di pasar inilah terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli. Semakin besar sebuah kota maka semakin besar dan semakin lengkap pulalah barang-barang yang dijual di pasar tersebut. Sebagai salah satu sektor yang mendapat perhatian dari pemerintah, maka keberadaan pasar dan pembangunan fisik pasar terus ditingkatkan. Pada sisi lain perkembangan sebuah pasar dapat pula dijadikan salah satu indikator untuk melihat perkembangan masyarakat. Menurut Winardi, pasar dapat dilihat dalam arti konkrit dan abstrak. Dalam artian konkrit, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan barang yang ditawarkan terdapat

di sana. Secara abstrak, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, sedang barang yang ditawarkan hanya berupa contoh-contoh.²²

Pedagang merupakan sebuah bidang pekerjaan yang sentral dalam sebuah pasar. Hal tersebut juga berlaku untuk Kota Dumai, terutama setelah Caltex menjadikan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan minyak pada tahun 1959. Kebutuhan pangan masyarakat seperti beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan didatangkan dari dua daerah yaitu Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Untuk mewadahi para pedagang ini, maka dibangunlah pasar-pasar sebagai pusat perekonomian dalam hal jual-beli kebutuhan masyarakat. Pasar yang pertama dibangun di Kota Dumai adalah pasar besi²³ pada tahun 1950.²⁴ Pasar ini dibangun oleh pemerintah dan sekarang bernama Pasar Baru. Pembangunan pasar itu baru ditambah 28 tahun kemudian (1978),²⁵ yang merupakan ide Gubernur Riau, H. R. Soebrantas. Pasar ini bernama Pasar Pulau Payung.²⁶ Pasar ini dibangun di atas tanah peladangan penduduk di daerah Sukajadi dan berfungsi sebagai pusat perdagangan kebutuhan bahan pokok.

Setelah itu, pembangunan pasar di Kota Dumai terus dilakukan sehingga pada tahun 1991, pasar di Kota Dumai berjumlah enam buah. Lima tahun berikutnya meningkat menjadi 12 buah. Luas ke-12 pasar ini tidak sama, ada yang kecil dan ada

²² Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu-Ilmu Ekonomi* (Bandung: Tarsito, 1983), hal. 217.

²³ Pasar Besi maksudnya adalah pasar yang kerangkanya terbuat dari besi dan atapnya terbuat dari asbes.

²⁴ Wawancara dengan Eva, Pegawai Bagian Humas Dinas Pasar Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 27 April 2009.

²⁵ Wawancara dengan H. Ali Syadikin, Ketua Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 28 April 2009.

²⁶ Dinamakan Pasar Pulau Payung karena di Kota Dumai terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Payung.

yang besar. Di samping itu, pasar ini dapat juga dibedakan atas barang-barang yang diperjualbelikan di sana. Pasar Pulau Payung misalnya yang merupakan pasar induk untuk memperdagangkan kebutuhan pokok. Kemudian fungsi Pasar Pulau Payung ini dialihkan ke Pasar Lepin.²⁷

Kemudian untuk mendukung keberadaan pasar tersebut, pada tahun 2005 dibangun sebuah Terminal Agribisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai, yang berfungsi untuk menampung komoditi berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain, yang didatangkan dari Bukittinggi dan Berastagi. Terminal ini juga berfungsi sebagai tempat transit barang dagangan tersebut yang selanjutnya diekspor ke Singapura dan Malaysia.²⁸

Pada tahun 2005, jumlah pasar di Kota Dumai sudah meningkat menjadi 26 buah pasar, yang tersebar pada lima kecamatan dalam wilayah Kota Dumai. Untuk mengetahui nama dan lokasi pasar, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Nama dan Lokasi Pasar di Kota Dumai Tahun 2005

No.	Kecamatan	Nama Pasar	Lokasi
1.	Dumai Timur	Pasar Senggol	Jalan Jenderal Sudirman
		Pasar Hayam Wuruk	Jalan Gajah Mada
		Pasar Jaya Mukti	Jalan Kesuma
		Pasar Tenaga	Jalan Tenaga
		Pasar Leppin	Jalan Jenderal Sudirman
		Pasar Buah	Jalan Jenderal Sudirman
		Pasar Dumai-Pakning	Jalan Dumai-Pakning
		Pasar Sementara Bintan-Paris	Jalan Bintan-Paris
		Pasar Leppin dan Karo-karo	Jalan Jenderal Sudirman

²⁷ Wawancara dengan Eva, Pegawai Bagian Humas Dinas Pasar Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 27 April 2009.

²⁸ Wawancara dengan Muchlis Suzantri, Pegawai Bagian Sarana dan Prasarana Kantor BAPPEDA Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 12 Mei 2009.

2.	Dumai Barat	Pasar Pulau Payung Pasar Jaya Malam Pasar Kelapa Pasar Dock Pasar PPI/ TPI Pasar Siak Pasar Minggu	Jalan Sukajadi Jalan Ombak Jalan Budi Kemuliaan Jalan Dock Yard Jalan Pattimura Jalan Siak Jalan Bukit Timah
3.	Bukit Kapur	Pasar Sukaramai Pasar Simpang Tiga Pasar Gurun Panjang	Jalan Dumai-Pekanbaru Kelurahan Bukit Kapur Kelurahan Gurun Panjang
		Pasar Pagi Bagan Besar	Jalan Dumai-Pekanbaru
4.	Sungai Sembilan	Pasar Senin-Kamis Pasar Simpang Pulai Pasar Bukit Kapur Pasar LPMK	Kelurahan Lubuk Gaung Kelurahan Basilam Baru Jalan Dumai-Pekanbaru Kelurahan Purnama
5.	Medang Kampai	Pasar Pelintung Pasar Selingsing	Jalan Dumai-Sei Pakning Jalan Selingsing

Sumber: *Laporan Tahunan Dinas Pasar Kota Dumai Tahun 2006*

Di samping itu, ada dua pasar yang tidak disebutkan di atas, yaitu Pasar Baru dan Pasar Usang. Pasar Baru terletak di Simpang Empat dan menjadi pasar untuk jenis barang-barang elektronik dan alat kendaraan. Pasar yang satu lagi adalah Pasar Usang yang terletak di sepanjang pelabuhan Dumai dan berdekatan dengan Pasar Kelapa, yang menyediakan barang-barang bekas: elektronik, perlengkapan rumah tangga, pakaian, dan sebagainya.²⁹

Pedagang lainnya adalah berupa pedagang keliling. Mereka menjual keramik, pakaian, perhiasan rumah, dan sebagainya. Jenis pedagang ini timbul disebabkan

²⁹ Wawancara dengan Hariyadi, Pegawai Bagian Umum Dinas Pasar Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 27 April 2009.

karena kekurangan dana untuk membuka usaha yang menetap. Mereka menjadi pedagang pengecer yang mengambil barang dagangan dari pedagang penyalur.³⁰

Umumnya para pedagang keliling itu berdomisili di daerah sekitar Kota Dumai. Mereka rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Para pedagang tersebut umumnya memiliki suatu ikatan yang didasarkan pada asal atau kesukuan. Para pedagang ini terkadang tinggal di satu rumah yang disewa bersama. Kebanyakan mereka berasal dari Jawa. Para pedagang keliling ini menjajakan berbagai jenis barang seperti guci keramik, pakaian, sendal, dan sepatu. Dalam menjalankan usahanya, mereka telah memiliki daerah dagang tersendiri.³¹

Bentuk usaha lain dari para pedagang adalah pedagang kaki lima, yang di Dumai lebih dikenal dengan nama pedagang emperan. Beberapa pedagang memanfaatkan emperan toko untuk menggelar dagangannya. Keberadaan dermaga pelabuhan dimanfaatkan juga untuk berdagang karena pelabuhan dijadikan sebagai tempat rekreasi atau hiburan. Para pedagang di pelabuhan ini terbagi dalam dua bagian yaitu pedagang yang memanfaatkan hari liburan dan pedagang tetap yang biasanya berjualan dari sore hingga malam hari. Kebiasaan masyarakat yang mengisi liburan di dermaga pelabuhan membuat pedagang tambah ramai di sepanjang pantai tersebut.³²

³⁰ Wawancara dengan Anis, Pedagang Keliling di Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 3 Mei 2009.

³¹ Wawancara dengan Sucipto, Pedagang Keliling di Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 3 Mei 2009.

³² Wawancara dengan Nina, Pedagang di Pelabuhan Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 4 Mei 2009.

b. Pendidikan

Pemerintah Kota Dumai juga sangat memperhatikan perkembangan pendidikan di wilayah pemerintahannya. Di Kota Dumai, sekolah sebagai sarana pendidikan pembelajaran dapat dikatakan cukup lengkap, yaitu mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak atau Raudhatul Anfal hingga Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan atau Madrasah Aliyah, baik itu yang merupakan sekolah negeri maupun beberapa sekolah yang dikelola oleh yayasan.³³

Gambaran umum perkembangan pendidikan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Menurut Tingkatan Sekolah di Kota Dumai Tahun 1999 – 2005

No.	Tahun	TK			SD			SMP			SMA		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	1999	-	20	20	66	11	77	7	13	20	2	5	7
2.	2000	-	22	22	67	12	79	6	15	21	2	8	10
3.	2001	-	23	23	76	11	81	6	14	20	2	6	8
4.	2002	-	23	23	79	11	90	10	13	23	3	6	9
5.	2003	-	25	25	78	11	89	10	10	20	8	10	18
6.	2004	1	28	29	78	10	88	10	13	23	8	10	18
7.	2005	1	29	30	79	11	90	10	14	24	8	10	18

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2000 dan 2006*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendidikan di Kota Dumai dari tahun 1999 sampai tahun 2005 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada awal berdirinya Kota Dumai. Pada tingkat sekolah Taman Kanak-kanak (TK) tahun 1999

³³ Wawancara dengan Kasiaruddin, SH, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 6 Mei 2009.

tidak ada satu pun sekolah negeri yang didirikan, sedangkan sekolah TK milik swasta berjumlah 20 buah. Akhirnya pada tahun 2004 didirikanlah satu buah sekolah Taman Kanak-kanak negeri, dan sekolah TK milik swasta bertambah menjadi 29 buah pada tahun 2005. Banyaknya jumlah murid di masing-masing sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16
Jumlah Murid Menurut Tingkatan Sekolah di Kota Dumai
Tahun 1999 - 2005 (dalam jiwa)

No.	Tahun	TK			SD			SMP			SMA		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	1999	-	1.933	1.933	25.200	2.207	27.407	4.533	4.719	9.252	1.660	2.411	4.071
2.	2000	-	2.282	2.282	23.894	3.746	27.640	4.056	4.271	8.327	1.828	2.586	4.414
3.	2001	-	2.408	2.408	25.347	3.698	29.045	4.357	3.578	7.935	1.373	2.380	3.753
4.	2002	-	2.615	2.615	25.931	3.764	29.695	5.358	3.327	8.685	2.139	2.501	4.640
5.	2003	-	2.004	2.004	23.388	4.917	27.405	5.155	3.950	9.105	4.349	5.004	9.353
6.	2004	80	2.343	2.423	27.408	3.696	30.804	5.245	3.451	8.696	4.400	4.375	8.775
7.	2005	88	2.548	2.672	27.728	3.584	31.312	5.235	3.505	8.940	4.706	4.114	8.820

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Dumai 1999-2005*

Adapun jumlah guru yang mengajar pada masing-masing sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17
Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah di Kota Dumai
Tahun 1999-2005 (Jiwa)

No.	Tahun	TK			SD			SMP			SMA		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	1999	-	100	100	737	118	855	223	242	465	110	152	262
2.	2000	-	172	172	814	308	1.122	219	222	441	142	169	311
3.	2001	-	100	100	929	192	1.121	254	249	503	127	82	209
4.	2002	-	157	157	890	198	1.088	309	233	542	147	141	288
5.	2003	-	166	166	1.002	182	1.184	310	241	551	132	281	413

6.	2004	5	210	215	1.137	113	1.250	320	232	552	300	290	590
7.	2005	7	219	226	1.235	157	1.392	338	233	571	415	271	686

Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Dumai*

Selain tingkat pendidikan seperti di atas, di Kota Dumai juga terdapat jenis pendidikan keagamaan Islam, seperti Diniyah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Berikut tabel jumlah sekolah agama Islam, guru dan murid yang ada di Kota Dumai tahun 2001-2005.

Tabel 18
Jumlah Sekolah Agama Islam, Guru dan Murid di Kota Dumai
Tahun 2001 – 2005

No.	Tahun	Diniyah Awaliyah			Ibtidaiyah			Tsanawiyah			Aliyah		
		Sekolah Guru Murid (Jiwa)			Sekolah Guru Murid (Jiwa)			Sekolah Guru Murid (Jiwa)			Sekolah Guru Murid (Jiwa)		
1.	2001	28	148	2.900	6	42	473	18	220	2.359	8	109	667
2.	2002	28	126	2.569	6	44	552	18	252	2.582	8	110	680
3.	2003	30	137	2.470	7	58	587	18	220	2.607	7	160	720
4.	2004	36	207	2.862	7	60	562	18	259	2.679	7	100	642
5.	2005	41	235	2.862	6	66	603	17	295	2.716	6	124	758

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2003 dan 2006*

Tidak sebatas sekolah menengah saja, beberapa perguruan tinggi juga sudah berdiri sejak Kota Dumai masih berstatus Kota Administratif. Di Kota Dumai terdapat tujuh buah perguruan tinggi. Berikut tabel nama-nama perguruan tinggi negeri/ swasta yang ada di Kota Dumai pada tahun 2005:

Tabel 19
Nama-Nama Perguruan Tinggi dan Tahun Berdiri di Kota Dumai Tahun 2005

No.	Perguruan Tinggi	Tahun Berdiri
1.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai	1985
2.	Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai	2000
3.	Akademi Manajemen Informatika (AMIK) Dumai	2000
4.	Akademi Akuntansi Riau (AKRI) Dumai	2002

5.	Akademi Keperawatan (AKPER) Sri Bunga Tanjung Dumai	2002
6.	STAI Tafaquh Fiddin Dumai	2003
7.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STMIK) Dumai	2005

Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Dumai*

Dalam menunjang kegiatan belajar ini, Pemerintah Kota Dumai juga memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa perguruan tinggi Kota Dumai serta memberikan bantuan dana bagi organisasi mahasiswa tersebut, di samping terus meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Hampir 30 persen dari total APBD Kota Dumai ini dialokasikan kepada sektor pendidikan yakni adanya tunjangan untuk para guru dan murid, seperti tunjangan guru dan murid berprestasi serta tunjangan bagi murid yang kurang mampu.³⁴

c. Jaringan Transportasi

Salah satu ukuran sebagai kota adalah tersedianya sarana transportasi yang memadai. Keadaan transportasi suatu daerah pada prinsipnya terkait dengan tersedianya jalan. Sektor transportasi yang dikembangkan di Kota Dumai adalah perhubungan darat, laut, dan udara.

1. Darat

Pembangunan jaringan transportasi melalui darat di Kota Dumai ditingkatkan guna menunjang kelancaran perhubungan. Perkembangan sarana transportasi darat dari dan ke Kota Dumai sejak tahun 1959 sampai sekarang semakin lancar, yang ditunjang dengan adanya kondisi jalan yang semakin baik. Pada tahun 1999 dan

³⁴ Wawancara dengan Kasiaruddin, SH, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 6 Mei 2009.

tahun 2000 panjang jalan Kota Dumai hampir sama yakni 858,024 km, dan pada tahun-tahun berikutnya pembangunan jalan di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya Kota Dumai sebagai daerah pelabuhan dan kota wisata, sehingga pada tahun 2005 panjang jalan mencapai 1.136,596 km.³⁵

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan jalan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Dumai dari tahun 1999 sampai tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20
Pembangunan Jalan di Kota Dumai
Tahun 1999-2005 (dalam km)

No.	Tahun	Panjang Jalan
1.	1999	858,024
2.	2000	858,024
3.	2001	944,624
4.	2002	1.020,199
5.	2003	1.139,187
6.	2004	1.141,648
7.	2005	1.136,596

Sumber: *Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2006*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 1999 panjang jalan di Kota Dumai yang dibangun adalah sepanjang 858,024 km. Tahun-tahun selanjutnya, pembangunan jalan sudah lebih ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan untuk kelancaran akses keluar masuknya kendaraan dan orang ke Kota Dumai melalui sarana transportasi darat.

³⁵ *Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 1999-2005*, hal. 4.

Adapun sarana transportasi angkutan darat yang ada di Kota Dumai terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat. Di samping itu, terdapat juga kendaraan non motor seperti becak kayuh.³⁶

Untuk menghubungkan Kota Dumai dengan kota lainnya seperti Pekanbaru dan Medan dilayani dengan oto bus yang berangkat setiap hari. Mini bus dan oplet diperuntukkan guna menghubungkan Kota Dumai dengan daerah sekitarnya, khususnya dalam daerah Kota Dumai saja. Untuk lebih mengefisienkan dan berlakunya tertib penggunaan jalan, dibangunlah terminal yang merupakan titik awal dan akhir para penumpang, barang, sekaligus berfungsi sebagai tempat transit. Adapun jenis-jenis angkutan darat dan perusahaannya di Kota Dumai pada tahun 2001-2004³⁷ dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21
Jenis-jenis Angkutan Darat dan Perusahaannya serta Jumlahnya di Kota Dumai Tahun 2001 – 2004

No.	Jenis	Tahun 2001		Tahun 2002		Tahun 2003		Tahun 2004	
		PO	Armada (unit)	PO	Armada (unit)	PO	Armada (unit)	PO	Armada (unit)
1.	Bus AKAP	39	56	24	60	28	59	28	59
2.	Bus AKDP	9	51	14	69	11	58	11	58
3.	Taksi	2	9	1	9	1	9	1	9
4.	Oplet	9	500	9	518	9	539	9	539
5.	Ojek	Persatuan Ojek Dumai	100	POD	101	POD	101	POD	101
		-	-	Koperasi Ojek Maju Jaya	33	KOMJ	33	KMJ	33
6.	Becak	Pribadi	1.670	Pribadi	1.800	Pribadi	1.800	Pribadi	1.800

³⁶ Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2004, hal. 21.
³⁷ Loc.cit., hal. 21.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2002 jumlah angkutan darat dan perusahaan yang memiliki angkutan darat tersebut mengalami peningkatan. Sebaliknya pada tahun 2003 jumlahnya mengalami penurunan dan pada tahun 2004 jumlahnya tetap seperti jumlah sebelumnya.

Terminal bus di Kota Dumai merupakan salah satu prasarana transportasi jalan yang merupakan titik simpul keberangkatan dan kedatangan penumpang/ orang dan barang maupun kendaraan yang keluar masuk ke Kota Dumai. Untuk kelancaran transportasi darat dan guna mendukung intensitas arus barang dan orang yang cukup tinggi, maka Kota Dumai telah menyiapkan dua buah terminal yakni Terminal Penumpang di Jalan Kelakap Tujuh seluas 7 ha dan Terminal Barang di Bukit Jin Kelurahan Bukit Datuk seluas 6 ha, yang keadaan fisiknya memenuhi syarat dan berlokasi jauh dari pusat kota.³⁸ Berikut jumlah bus dan penumpang yang keluar/ masuk melalui terminal bus Dumai tahun 2002-2005:

Tabel 22
Jumlah Kendaraan dan Penumpang Yang Keluar/ Masuk Melalui Terminal Bus Dumai Tahun 2001-2005

No.	Tahun	Kendaraan			Penumpang (Orang)		
		Berangkat	Datang	Jumlah	Berangkat	Datang	Jumlah
1.	2001	33.869	32.872	66.741	610.694	598.648	1.209.342
2.	2002	33.994	33.955	67.949	558.320	548.040	1.106.360
3.	2003	32.145	32.046	64.191	599.082	595.145	1.194.227
4.	2004	32.101	34.032	68.133	721.127	700.876	1.422.023
5.	2005	35.640	32.540	68.180	566.172	462.960	1.029.132

Sumber: *Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2005*

³⁸ Wawancara dengan H. Eddi Erdant, SH, Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 11 Mei 2009.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan yang berangkat/ datang melalui terminal bus Dumai pada tahun 2003 mengalami penurunan. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang drastis yakni sebanyak 3.942 kendaraan. Tidak berbeda dengan jumlah penumpang yang berangkat/ masuk melalui terminal bus Dumai yang juga mengalami pasang surut. Dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan yang cukup banyak, tapi tahun selanjutnya mengalami penurunan yang cukup banyak juga.

2. Laut

Sebagai salah satu pintu gerbang daerah Timur Sumatera, pelabuhan Dumai tidak hanya melayani tujuan domestik seperti Pekanbaru, Bengkalis, Pulau Rupat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan lain sebagainya, tetapi juga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sarana perhubungan laut merupakan salah satu sektor andalan Kota Dumai untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jumlah perusahaan pengguna jasa pelabuhan Dumai dalam sektor ekspor-impor dan bongkar-muat barang pada tahun 2001-2004 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23
Jumlah Perusahaan Pengguna Jasa Pelabuhan Dumai Tahun 2001 – 2004

No.	Jenis	2001	2002	2003	2004	Keterangan
1.	Pelayaran Nasional	9	30	33	35	Aktif
2.	Pelayaran Rakyat	7	14	16	15	Aktif
3.	Non Pelayaran	-	-	-	-	-
4.	Perusahaan Bongkar Muat	22	22	25	27	Aktif
5.	Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut/ Jasa Titipan Barang	16	16	21	22	Aktif

Sumber: *Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2004*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2001 sampai tahun 2004, jumlah perusahaan pengguna jasa pelabuhan Dumai mengalami peningkatan. Hanya dari tahun 2001 ke 2002 saja jumlah perusahaan pengguna jasa pelabuhan yang tidak mengalami peningkatan atau stabil, yakni perusahaan bongkar muat dan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut/ jasa titipan barang. Pada tahun selanjutnya meningkat dari 22 buah pada tahun 2002 menjadi 27 buah pada tahun 2004 (perusahaan bongkar muat), dan dari 16 buah pada tahun 2002 menjadi 22 buah pada tahun 2004 (perusahaan ekspedisi muatan kapal laut/ jasa titipan barang).

Pelabuhan laut Kota Dumai merupakan salah satu pelabuhan Samudera di Indonesia yang dikelola oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. Pada tahun 2001, di Kota Dumai terdapat sembilan unit pelabuhan yang terdiri dari satu unit pelabuhan milik PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai, empat unit pelabuhan milik PT. Chevron Pacific Indonesia, dan empat unit pelabuhan milik Pemerintah. Pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah merupakan pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang. Di samping itu, terdapat juga pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan masyarakat yakni berupa pelabuhan dan dermaga kecil sebanyak delapan buah terutama di sepanjang Sungai Dumai.³⁹

Di Kota Dumai tersedia pelabuhan Samudera yang melayani pelayaran nasional dan internasional, yaitu :

1. Pelabuhan umum Pelindo yang dikenal internasional, dengan kedalaman 11 m yang dapat mengakomodasi kapal dengan bobot 20 - 30 ribu dwt dan dapat

³⁹ Wan Syamsir Yus dan Herdi Salioso, *Comparative Advantage Kota Dumai Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Provinsi Riau* (Pekanbaru: UNRI Press, 2002), hal. 11.

melakukan bongkar muat barang umum sebesar 5,6 juta ton/tahun dan CPO (Pengolahan Minyak Kelapa Sawit) 4 juta ton/tahun.⁴⁰

2. Pelabuhan Caltex/Chevron, gunanya untuk mengangkut minyak mentah dan BBM (Bahan Bakar Minyak), dengan kedalaman 16 m dengan bobot 60 – 70 dwt.⁴¹

3. Pelabuhan Pertamina, gunanya untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, dengan kedalaman kolam pelabuhan 15 m dan dapat mengakomodasi kapal 60 ribu dwt.⁴²

4. Pelabuhan Caltex dan Pertamina berfungsi untuk mengangkut minyak mentah BBM, dengan kedalaman kolam pelabuhan 13 m dan dapat mengakomodasi kapal 60 dwt.⁴³

5. Pelabuhan Kawasan Industri Dumai (KID) berfungsi untuk mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK, dengan kedalaman kolam pelabuhan 14 m dan dapat mengakomodasi kapal 50 ribu dwt. Pelabuhan KID telah beroperasi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.⁴⁴

Pelabuhan Dumai merupakan salah satu prasarana transportasi laut yang merupakan titik simpul keberangkatan dan kedatangan penumpang maupun kapal yang datang dan berangkat. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah kapal

⁴⁰ Wawancara dengan Yurnalis Effendi, SH, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 11 Mei 2009.

⁴¹ Wawancara dengan Yurnalis Effendi, SH, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 11 Mei 2009.

⁴² Wawancara dengan Yurnalis Effendi, SH, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 11 Mei 2009.

⁴³ Wawancara dengan Yurnalis Effendi, SH, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 11 Mei 2009.

⁴⁴ Wawancara dengan Yurnalis Effendi, SH, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 11 Mei 2009.

penumpang dan penumpang yang datang dan berangkat melalui pelabuhan Dumai tahun 2001-2004.

Tabel 24
Jumlah Kapal Penumpang dan Penumpang Yang Datang dan Berangkat di Pelabuhan Dumai Tahun 2001 – 2004

No.	Tahun	Kapal		Jumlah	Penumpang Luar/ Dalam Negeri		Jumlah
		Berangkat	Datang		Berangkat	Datang	
1.	2001	3.963	3.963	7.926	459.130	447.707	906.837
2.	2002	3.778	3.778	7.556	438.074	488.725	926.799
3.	2003	1.582	1.582	3.164	284.371	337.568	621.939
4.	2004	3.335	3.335	6.670	359.209	418.187	777.396

Sumber: *Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2004*

Pelabuhan merupakan urat nadi perhubungan laut Kota Dumai dengan jalur perhubungan luar negeri dan dalam negeri. Perhubungan luar negeri yakni sebagai jalur ekspor dan impor barang kontainer dan berfungsi juga sebagai pelabuhan penumpang menuju Port Dickson (Negeri Sembilan), Malaka, Muar (Johor), dan Singapura. Pelabuhan dalam negeri dengan tujuan Bengkalis, Selat Panjang, Karimun, Batam, Tanjung Pinang, Bagansiapi-api, Belawan, dan Jakarta.⁴⁵

3. Udara

Untuk transportasi udara, di Kota Dumai terdapat bandar udara yang bernama Bandara Pinang Kampai, dengan panjang lintasan 1800 m dan lebar 30 m dengan tipe aspal, yang dapat menampung pesawat seperti Fokker 28 dan Fokker 100, dan akan dikembangkan menjadi 2.250 x 45 m pada tahun 2010 yang akan datang. Bandara

⁴⁵ Wawancara dengan Yurnalis Effendi, SH, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 11 Mei 2009.

Pinang Kampai terletak di Selatan Kota Dumai tepatnya di jalan raya Dumai-Duri dan berdekatan dengan kompleks perumahan PT. Chevron Pacific Indonesia.⁴⁶

Bandara ini terutama sekali digunakan untuk kepentingan perusahaan minyak yang beroperasi di Kota Dumai, seperti PT. (Persero) Pertamina dan PT. Chevron Pacific Indonesia. Bandara ini dilengkapi dengan sarana navigasi *non-directional beacon (NDB)*, *runway light*, *taxiway light*, *apron light*, hangar helikopter dan helipad. Tersedia juga depo pengisian bahan bakar pesawat udara beserta tankernya dan sarana pemadam kebakaran.

Maskapai penerbangan di Bandara Pinang Kampai Kota Dumai dilayani oleh PT. Pelita Air Service untuk rute Jakarta dan kota lainnya dengan jadwal penerbangan sebanyak tiga kali seminggu. Pelita Air Service ini digunakan oleh karyawan Pertamina dan Chevron untuk kepentingan kerja maupun pribadi, dengan rute Dumai-Jakarta. Sedangkan untuk para staf Pertamina dan Chevron menggunakan pesawat F-28 sebanyak enam kali sebulan dan F-100 sebanyak 25 kali sebulan. Mulai bulan Juni 2003 yang lalu, Merpati Airlines membuka jalur penerbangan ke Pekanbaru (pulang-pergi) sebanyak tiga kali seminggu, dan diikuti oleh PT. Riau Airlines (RAL) untuk penumpang umum dengan rute Dumai-Pekanbaru-Jakarta.⁴⁷

⁴⁶ Wawancara dengan Yurnalis Effendi, SH, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 11 Mei 2009.

⁴⁷ Wawancara dengan Muchlis Suzantri, Pegawai Bagian Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kota Dumai, di Dumai pada tanggal 12 Mei 2009.

Tabel 25
Jumlah Pesawat dan Penumpang Yang Datang dan Berangkat Melalui Bandar
Udara Pinang Kampai Kota Dumai Tahun 1999 – 2005

No.	Tahun	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)		
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Transit
1.	1999	676	676	23.291	25.398	6.317
2.	2000	728	728	21.232	23.302	9.068
3.	2001	434	423	21.891	23.548	8.381
4.	2002	649	649	20.989	21.910	6.402
5.	2003	914	914	26.635	28.760	7.386
6.	2004	1.037	1.037	31.662	34.794	39.765
7.	2005	775	775	26.629	26.422	16.828

Sumber: *Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2002, 2003 dan 2006.*

d. Pariwisata

Bagi Kota Dumai yang memiliki potensi alam dan budaya yang cukup menarik untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilihan guna meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakatnya. Harapan dan perhatian Pemerintah Daerah Kota Dumai terhadap dunia kepariwisataan ditunjukkan dengan dibentuknya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai pada tahun 2004. Pengembangan kepariwisataan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai, salah satunya adalah dengan terus meningkatkan obyek-obyek pariwisata.

Cukup banyak obyek wisata menarik yang dapat dilihat selama dalam perjalanan menuju Kota Dumai, antara lain perkampungan Suku Sakai, aliran sungai dengan warna khas kemerahan serupa air teh, belantara hutan tropis dengan hutan-

hutan lebat yang masih asri, ladang-ladang eksplorasi minyak dan gas alam serta ribuan hektar perkebunan sawit,⁴⁸ membentang sejauh mata memandang.

Obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Di Kota Dumai terdapat 29 buah tempat obyek wisata dengan daya tarik masing-masing, yang terdiri dari tujuh buah obyek wisata alam, delapan buah obyek wisata budaya dan sejarah, dan empat buah obyek wisata agama, tujuh buah obyek wisata olahraga, dan dua buah obyek wisata tirta.⁴⁹ Potensi pariwisata Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26
Potensi Pariwisata Kota Dumai

Jenis	Lokasi	Jarak dari Pusat Kota Dumai (km)
A. Wisata Alam		
1. Danau Bunga Tujuh	Jalan Pinang Kampai	± 9
2. Penangkaran Harimau Hutan Senepis	Sungai Sembilan	± 35
3. Kuala Sungai Dumai	Jalan Pinang Kampai	± 9
4. Pantai Teluk Makmur	Teluk Makmur	± 13
5. Pantai Purnama	Jalan Batu Bintang	± 7
6. Hutan Wisata	Jalan Pinang Kampai	± 5
7. Pesona Bukit Seludung	Pelintung	± 25
B. Wisata Sejarah		
1. Makam Pawang Lion	Pelintung	± 25
2. Makam Keramat Datuk Delau	Teluk Makmur	± 13
3. Perigi Tuk Kurus	Jalan Bukit Timah	± 5
4. Batu Telapak Harimau Sakti	Pelintung	± 25
5. Keramat Cengal Sakti	Jalan Teduh	± 2
6. Makam Tuk Kedondong	Kompleks PT. Patra Dock	± 3
7. Makam Tuk Syeh Umar	Jalan Syeh Umar	± 2
8. Makam Putri Tujuh	Jalan Putri Tujuh	± 3
C. Wisata Agama		

⁴⁸ Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata Provinsi Riau, *Profil Pariwisata Riau* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2004), hal. 12.
⁴⁹ *Dumai Dalam Angka* (Dumai: BPS, 2005), hal. 186.

1. Kelenteng	Jalan Kelakap Tujuh	± 7
2. Mesjid Raya Dumai	Jalan Raya Dumai-Duri	± 18
3. Persulukan Naqsabandiyah	Jalan Raya Dumai-Duri	± 18
4. Pondok Pengajian An-Nazimar	Jalan Pemuda Laut	± 2
D. Wisata Olahraga		
1. Lapangan Golf	Kompleks Pertamina	± 3
2. Lapangan Golf	Kompleks Caltex	± 3
3. Kolam Renang Simanalagi	Bagan Besar	± 9
4. Kolam Renang Bukit Datuk	Pertamina	± 3
5. Kolam Renang Bukit Jin	Caltex	± 4
6. Kolam Pancing Patra	Jalan Bukit Datuk	± 3
7. Kolam Pancing Idola	Jalan Bukit Timah	± 9
E. Wisata Tirta		
1. Taman Wahana Tirta	Caltex	± 10
2. Mina Patra	Pertamina	± 8

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2005

Dalam pengembangan suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan dalam berbagai segmen pasar, yang paling penting harus memiliki tiga unsur, yaitu: (1) di daerah tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki daerah lain atau dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus, (2) di tempat tersebut banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat para pengunjung betah tinggal lebih lama di sana, dan (3) di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing pengunjung.⁵⁰

Setiap tahunnya di Kota Dumai diadakan berbagai event yang dapat menjadi event wisata yang layak untuk dikunjungi, terutama dalam rangka memperingati Hari

⁵⁰ "Profil Pariwisata Riau", *op.cit.*, hal. 16.

Ulang Tahun (HUT) Kota Dumai pada tanggal 27 April dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa event wisata penting yang menjadi daya tarik tersendiri di Kota Dumai antara lain adalah Rentak seni Budaya, Pawai Budaya 15 Suku se-Kota Dumai, Festival Band se-Provinsi Riau, Lomba Memancing Piala Gubernur Riau, Festival Qasidah Rebana, Festival Kompang, dan Festival Nasyid serta Lomba Permainan Tradisional yang meliputi Lomba Layang-Layang, Lomba Dayung Sampan, dan Lomba Jong Katil.⁵¹

Sebagai salah satu pintu gerbang memasuki daerah Riau Daratan, Kota Dumai saat ini mulai banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai negara, terutama wisatawan yang melanjutkan perjalanannya dari Malaka dan Malaysia. Kota Dumai mudah dicapai dari berbagai kota besar dan kecil di seluruh Sumatera karena tersedianya jaringan dan sarana perhubungan yang baik, yaitu jalan raya Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan seluruh Pulau Sumatera mulai dari ujung Utara sampai Selatan.

Meningkatnya jumlah wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, harus diimbangi pula dengan sarana pendukung lainnya seperti hotel. Hotel memegang peranan yang penting untuk meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik ke suatu lokasi pariwisata, yang juga akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, pendapatan masyarakat, devisa negara dan lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sektor-sektor lain seperti kerajinan rumah tangga, angkutan, jasa informasi pariwisata, pemandu wisata,

⁵¹ Brosur Kota Dumai.

dan biro atau agen perjalanan wisata.⁵² Pada tabel di bawah ini dapat dilihat daftar hotel/ penginapan/ wisma serta fasilitas yang dimiliki di Kota Dumai pada tahun 2005.

Tabel 27
Daftar Hotel/ Penginapan/ Wisma Serta Fasilitas Yang Dimiliki
di Kota Dumai Tahun 2005

No.	Nama Hotel/ Wisma/ Penginapan	Kapasitas		Klasifikasi
		Kamar	Tempat Tidur	
1.	Grand Zuri Hotel	97	151	Bintang Tiga
2.	Comfort Hotel	109	120	Bintang Tiga
3.	City Hotel	76	110	Bintang Satu
4.	Patra Hotel	34	48	Melati
5.	Tasia Hotel	54	105	Melati
6.	Southern Asia Hotel	34	68	Melati
7.	Horizona Hotel	30	40	Melati
8.	Wisata Hotel	41	82	Melati
9.	Palapa Hotel	50	92	Melati
10.	Mayang Suri Hotel	20	40	Melati
11.	Penginapan Mulia	7	7	Melati
12.	Gajah Mada Hotel	40	97	Melati
13.	Ana Sister Hotel	20	45	Melati
14.	Srikandi Hotel	30	30	Melati
15.	Dumai Indah Hotel	12	12	Melati
16.	Penginapan Andy's Nur	27	78	Melati
17.	Penginapan AA	20	72	Melati
18.	Penginapan Lenggogeni	20	52	Melati
19.	Penginapan Palapa Jaya	10	20	Melati
20.	Penginapan Harsa	7	7	Melati
21.	Penginapan Rahmat	15	30	Melati
22.	Penginapan Ilham Inn	20	-	Melati
23.	Wisma Mini	15	17	Melati
24.	Wisma Kepegtel	5	5	Melati
25.	Wisma Riau Indah	6	22	Melati
Jumlah		799	1.350	

Sumber: *Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai*

⁵² Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau, *Identifikasi Potensi Pariwisata Riau* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2004), hal. 5.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kota Dumai terdapat 25 buah tempat penginapan, yang terbagi dalam tiga klasifikasi yakni hotel bintang tiga, hotel bintang satu, dan melati. Penginapan berbintang tiga hanya berjumlah dua buah hotel, dan berbintang satu hanya satu buah hotel. Sementara itu, tempat penginapan yang lebih mendominasi adalah yang mempunyai klasifikasi sebagai penginapan melati yaitu sebanyak 22 buah penginapan.



BAB IV

KESIMPULAN

Penduduk Dumai mulai meningkat jumlahnya ketika Pemerintahan Jepang mendatangkan para romusha yang berasal dari Jawa untuk membangun jalur kereta api dari Dumai ke Pekanbaru yang berjarak 204 km. Daerah Dumai mulai mengalami perkembangan sejak Caltex menjadikan Dumai sebagai daerah pelabuhan minyaknya (1959). Beberapa tahun kemudian (1964) Dumai dijadikan sebagai kecamatan. Perkembangan Pemerintahan Dumai terjadi pada tahun 1979 ketika Dumai berubah menjadi kota administratif. Setelah 20 tahun kemudian, pertumbuhan dan perkembangan Kota Dumai semakin meningkat sehingga Pemerintahan Dumai berubah dari kota administratif menjadi pemerintahan kota. Hal ini merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 27 April 1999 diresmikan Dumai sebagai Pemerintahan Kota.

Penduduk Dumai bersifat heterogen yakni terdiri dari berbagai etnis, antara lain Melayu, Minang, Jawa, Batak, Bugis, Sunda, dan ada juga penduduk Asia lainnya yaitu Cina dan India. Di samping itu, ada juga orang Eropa dan Amerika Serikat yang bekerja di Caltex. Penduduk yang mayoritas di dalam wilayah Kota Dumai adalah etnis Melayu, yang merupakan penduduk asli Kota Dumai.

Perkembangan Kota Dumai sebagai daerah pelabuhan minyak Caltex menyebabkan adanya keberagaman pekerjaan. Para pekerja yang banyak terserap dalam dunia kerja di Dumai kebanyakan berasal dari luar Dumai atau pendatang. Kehadiran Caltex menyebabkan penduduk asli berangsur-angsur meninggalkan mata

pencabarian lama dan beralih menjadi buruh kasar untuk pembangunan infrastruktur Caltex, seperti pembangunan dermaga-dermaga untuk persinggahan kapal-kapal pengangkut minyak.

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah ketimpangan dan kecemburuan sosial serta konflik yang bermuara kepada disintegrasi, maka didirikanlah Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD) yang terdiri dari 15 etnis. Semua permasalahan yang menyangkut konflik suku, ras dan agama serta permasalahan sosial lainnya dimufakatkan di dalam LKKMD tersebut, sehingga konflik yang berkembang dapat diminimalisir secepat mungkin.

Kota Dumai memiliki 26 buah pasar, besar dan kecil. Pasar pertama yang terdapat di Kota Dumai adalah Pasar Besi yang dibangun tahun 1950. Kemudian (1978) dibangun pasar kedua, yang dinamakan Pasar Pulau Payung. Peningkatan jumlah pasar Kota Dumai terjadi sejak tahun 1991. Pengelolaan pasar di Kota Dumai dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

Pemerintah Kota Dumai meningkatkan pendidikan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SLTP, SLTA sampai Perguruan Tinggi. Beberapa lembaga pendidikan tersebut dikelola oleh yayasan. Pada saat ini Kota Dumai memiliki tujuh buah Perguruan Tinggi yang semuanya dikelola oleh swasta.

Untuk menghubungkan Kota Dumai dengan kota lainnya seperti Pekanbaru, Medan, Padang, dan lain-lain, Pemerintah Kota Dumai pada tahun 1998 membangun sebuah terminal yang melayani angkutan penumpang dan barang. Terminal merupakan titik awal dan akhir para penumpang, barang, sekaligus berfungsi sebagai

tempat transit. Di samping itu, Pelabuhan Dumai juga berfungsi sebagai pelabuhan yang melayani kapal-kapal penumpang di dalam negeri dan luar negeri. Begitu juga dengan Bandar Udara Pinang Kampai yang digunakan untuk kepentingan para karyawan dan staf PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan PT. (Persero) Pertamina. Bandar Udara Pinang Kampai ini juga melayani penumpang umum.



DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 1999-2005.*
- Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2002.*
- Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2004.*
- Laporan Tahunan Dinas Pasar Kota Dumai Tahun 2006.*
- Laporan Tahunan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2004.*
- Monografi Kota Administratif Dumai 1984.*
- Monografi Kabupaten Bengkalis, 1990.*
- Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1994 (Bengkalis: BAPPEDA dan Kantor Statistik Kabupaten Bengkalis, 1994).*
- Pemerintah Provinsi Riau, Pendapatan Regional Kabupaten/ Kota Menurut Lapangan Usaha 1997-1999 (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2000).*
- Pemerintah Provinsi Riau, Sumber dan Potensi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 1986 (Pekanbaru: Kerjasama BAPPEDA dengan Kantor Statistik Riau, 1986).*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.*

Terbitan Berkala

- Brosur Kota Dumai.*
- Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 1980).*
- Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 1990).*
- Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 1999)*

Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 2000).

Dumai Dalam Angka (Dumai : BPS, 2001).

Dumai Dalam Angka (Dumai : BPS, 2002).

Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 2003).

Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 2004).

Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 2005).

Dumai Dalam Angka (Dumai: BPS, 2006).

Kabupaten Bengkalis Dalam Angka (Bengkalis: BPS, 1970).

Kabupaten Bengkalis Dalam Angka (Bengkalis: BPS, 1983 dan 1994).

Buku

Agoes Budianto, dkk, *Dumai Tempo Dulu, Dumai Sekarang* (Dumai: Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai, 2007).

Ahmad Yusuf, dkk, *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942, Jilid I* (Pekanbaru: Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, 2004).

A. W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).

Azwar, *Pendekatan Klasifikasi Kota Dunia dan Indonesia: Mulai dari cara Numerik sampai Non-Numerik* (Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP, 2006).

Bagian Humas Pemerintah Kota Dumai, *Kondisi dan Peluang Investasi Kota Dumai* (Dumai: Pemerintah Kota Dumai, 2002).

Bagian Humas Pemerintah Kota Dumai, *Profil Kota Dumai* (Dumai: Pemerintah Kota Dumai, 2007).

Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indo, 1983).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata Provinsi Riau, *Profil Pariwisata Riau* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2004).

- Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau, *Identifikasi Potensi Pariwisata Riau* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2004).
- Djoko Sudantoko, *Dilema Otonomi Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2003).
- Djamaludin Ancok, *Kasus Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Pindah Kerja di PT. Caltex Pacific Indonesia* (Pekanbaru: UNRI Press, 2003).
- Ensiklopedi Indonesia* Jilid II (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve).
- Herdi Salioso, *Kota Dumai: Mutiara Pantai Timur Sumatera* (Pekanbaru: UNRI Press, 2003).
- H. Nahar Effendi Yusuf, *Merajut Asa, Menggapai Cita: Perjuangan Masyarakat Dumai Menuju Kota Mandiri* (Dumai: Kerjasama Pemerintah Kota Dumai Dengan Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai (LKKMD), 2007).
- Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986).
- Mestika Zed, *Metodologi Sejarah*, Diktat (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 1999).
- Nazar Dahlan, *Sejarah Riau*, (Pekanbaru: Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, 1979).
- Silva Yuliana, dkk, *Dumai Tempo Doeloe* (Dumai: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai, 2004).
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Sapari Imam Asy'ari, *Sosiologi Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993).
- S. Pamudji, *Pembinaan Perkantoran di Indonesia Tinjauan Aspek Administrasi Pemerintahan* (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Suhartono, *Penelitian Arsip* (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Sastra UGM, Tanpa Tahun Terbit, UNAND, 2006).
- Silva Yuliana, dkk, *Dumai Tempo Doeloe* (Dumai: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai, 2004).
- Wan Syamsir Yus dan Herdi Salioso, *Comparative Advantage Kota Dumai: Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Provinsi Riau* (Pekanbaru: UNRI Press, 2002).

Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu-Ilmu Ekonomi* (Bandung: Tarsito, 1983).

Skripsi

Jufri Sahrin, *Perkembangan Perusahaan Pengelola Pelabuhan: Studi Kasus PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai 1991-1999* (Padang: Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2007).

Riski, *Industrialisasi dan Perubahan Masyarakat Di Dumai 1969-1999* (Padang: Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2003).

Majalah

Caltex Dalam Peta Perminyakan Indonesia dalam Warta Caltex Nomor 33, 1993.

Daeng Ayub Natuna, *Kotamadya Dumai Dulu Sebuah Perkampungan Sepi* dalam *Jurnal Teroka Riau Volume II Nomor II* (Pekanbaru: BAPPEDA Tingkat I Riau, Februari 2000).

LINTAS, *LKKMD dan Gerakannya: Bersama Bergerak Maju* (Jakarta: Institut Pluralisme Indonesia (IPI), April 2005).

Muhammad Ikhsan, *Menata Kota Kita: Harapan Untuk Kota Dumai* (Provinsi Riau: Jurnal Industri dan Perkotaan Vol. 5 Nomor 9/ Agustus 2001).

Romantika Pengapalan dan Ekspor Minyak Bumi dalam Warta Caltex No. 18, 1989.

DAFTAR INFORMAN

Nama : Ahmad Ramadhan, S. Sos
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Camat Bukit Kapur Kota Dumai
 Alamat : Jalan Lembaga

Nama : H. Ali Syadikin
 Umur : 60 Tahun
 Pekerjaan : Sesepuh dan Ketua Kerapatan Adat Melayu Riau Kota Dumai
 Alamat : Jalan Bumi Ayu

Nama : Andi
 Umur : 58 Tahun
 Pekerjaan : Penasehat Lembaga Adat Melayu dan Penasehat Laskar Melayu Kota Dumai
 Alamat : Jalan Sukajadi

Nama : Anis
 Umur : 30 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang Keliling
 Alamat : Jalan Kasuari

Nama : Dahlan
 Umur : 32 Tahun
 Pekerjaan : Pegawai Bagian Humas Pertamina UP II Dumai
 Alamat : Perumahan Pertamina UP II Blok D No. A. 12 Bukit Datuk

Nama : Ir. Dedi Saputra
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : Pegawai Bagian Humas PT. CPI
 Alamat : Perumahan Chevron Bukit Jin

Nama : Eddy Sudiarto
 Umur : 65 Tahun
 Pekerjaan : Pensiunan PT. CPI Kota Dumai
 Alamat : Perumahan Chevron Bukit Jin

Nama : H. Eddi Erdant, SH
 Umur : 46 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat Kota
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman

Nama : Eva
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Bagian Humas Dinas Pasar Kota Dumai
Alamat : Jalan Sukajadi Gang Nenas

Nama : G. Nasution
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PT. CPI Kota Dumai
Alamat : Perumahan Chevron Bukit Jin

Nama : Hariyadi
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Bagian Umum Dinas Pasar Kota Dumai
Alamat : Jalan Dock Yard

Nama : Hendrik, SH
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Bagian Kesejahteraan Karyawan PT. CPI Kota Dumai
Alamat : Perumahan Chevron Bukit Jin

Nama : Kasiaruddin, SH
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai
Alamat : Jalan Kelakap Tujuh

Nama : Nina
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Pedagang di Pelabuhan Kota Dumai
Alamat : Jalan Pelintung

Nama : Muchlis Suzantri
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Bagian Sarana dan Prasarana Kantor BAPPEDA Kota Dumai
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman

Nama : Riki
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Alamat : Jalan Yos Sudarso

Nama : Rosna
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jalan Sultan Syarif Kasim Gang Lelong

Nama : Roby Fernando, SH
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Bagian Umum PT. CPI Kota Dumai
Alamat : Perumahan Chevron Bukit Jin

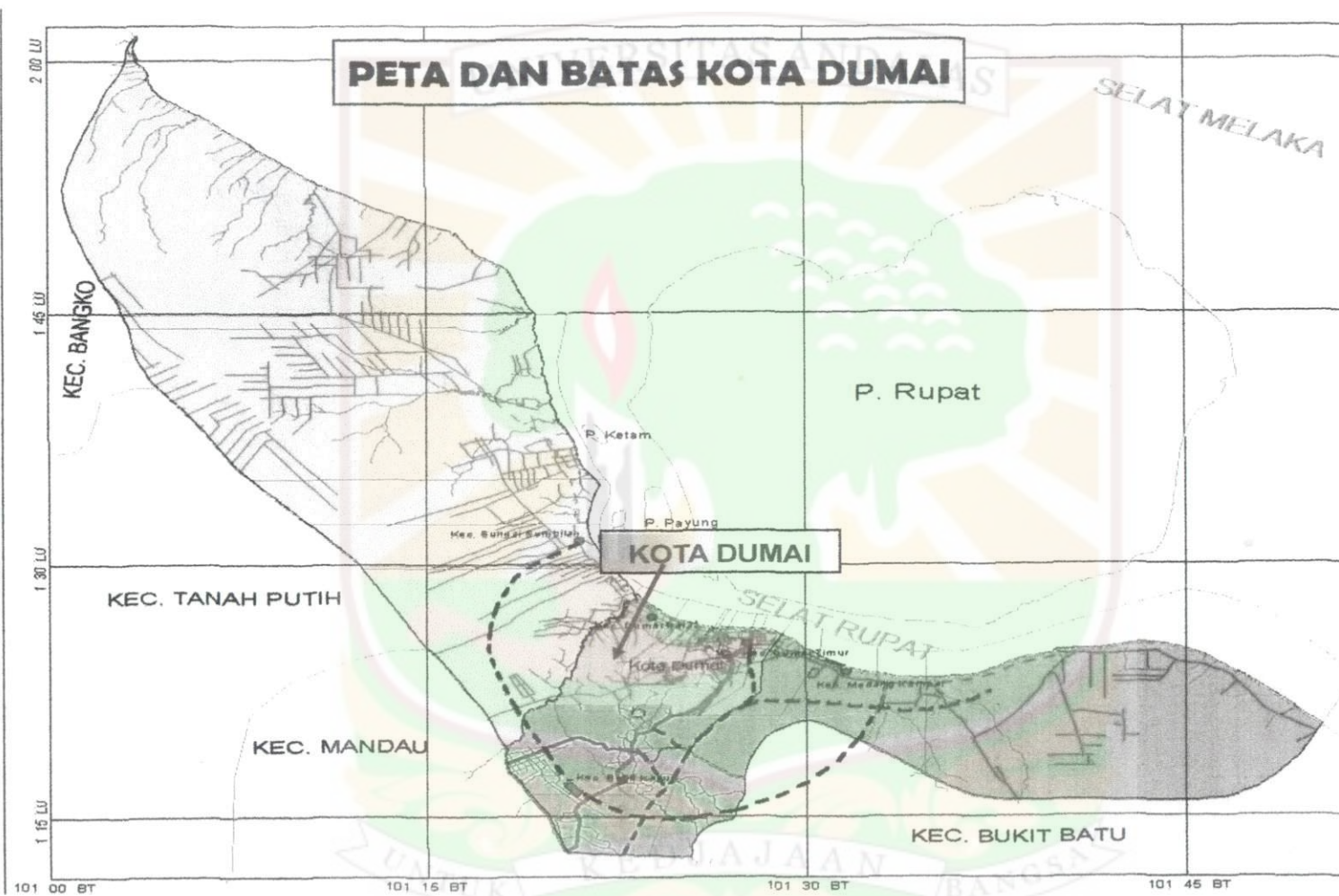
Nama : Sucipto
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Pedagang Keliling
Alamat : Jalan Geroga Duri

Nama : Teguh
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jalan Tenaga

Nama : Wahyu
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Bagian Tata Usaha Kantor Walikota Dumai
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman

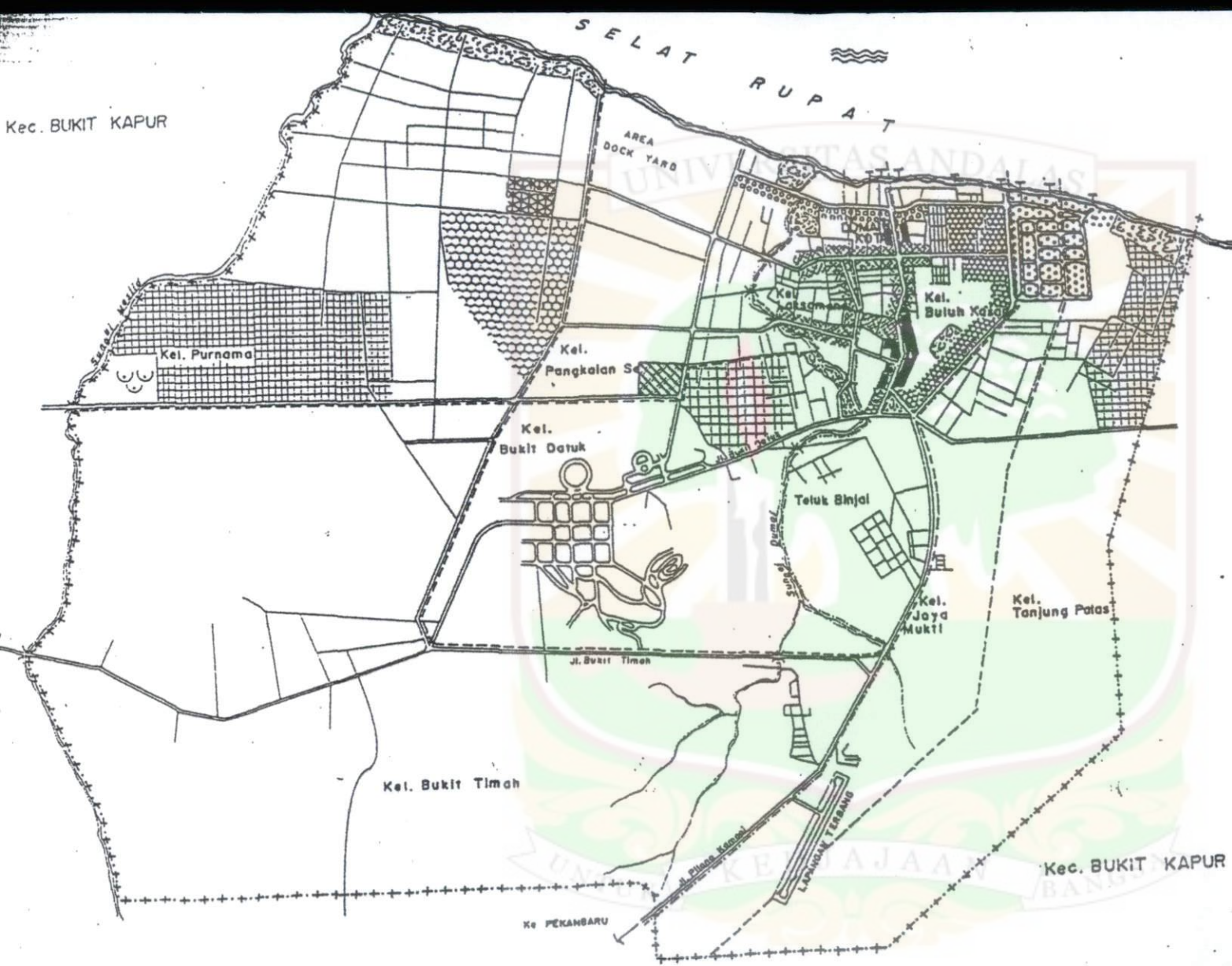
Nama : Yurnalis Effendi, SH
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Dumai
Alamat : Jalan Sultan Syarif Kasim

Nama : Ir. Zainal Arifin
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Bagian sarana dan Prasarana PT. CPI Kota Dumai
Alamat : Perumahan Chevron Bukit Jin



Sumber: BAPPEKO Dumai

Kec. BUKIT KAPUR



**STRUKTUR RUANG KOTA DUMAI
1985 - 2005**

KETERANGAN

- Batas Kota Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Besar
- Jalan Kecil
- Garis Pantai
- Sungai
- Dermaga
- Jembatan
- Jasa (Hotel)
- Daerah Kepentingan Pelabuhan
- Jasa & Perdagangan
- Jalur Hijau
- Perkantoran
- Terminal Kota
- Lahan Cadangan
- Pertamina
- Gresik
- Pusat Rekreasi Kota
- Daerah Pertamina
- Kuburan

Diketahui : _____
 Diperiksa : _____
 Digambar : Abdul Rais
 Disetujui : _____

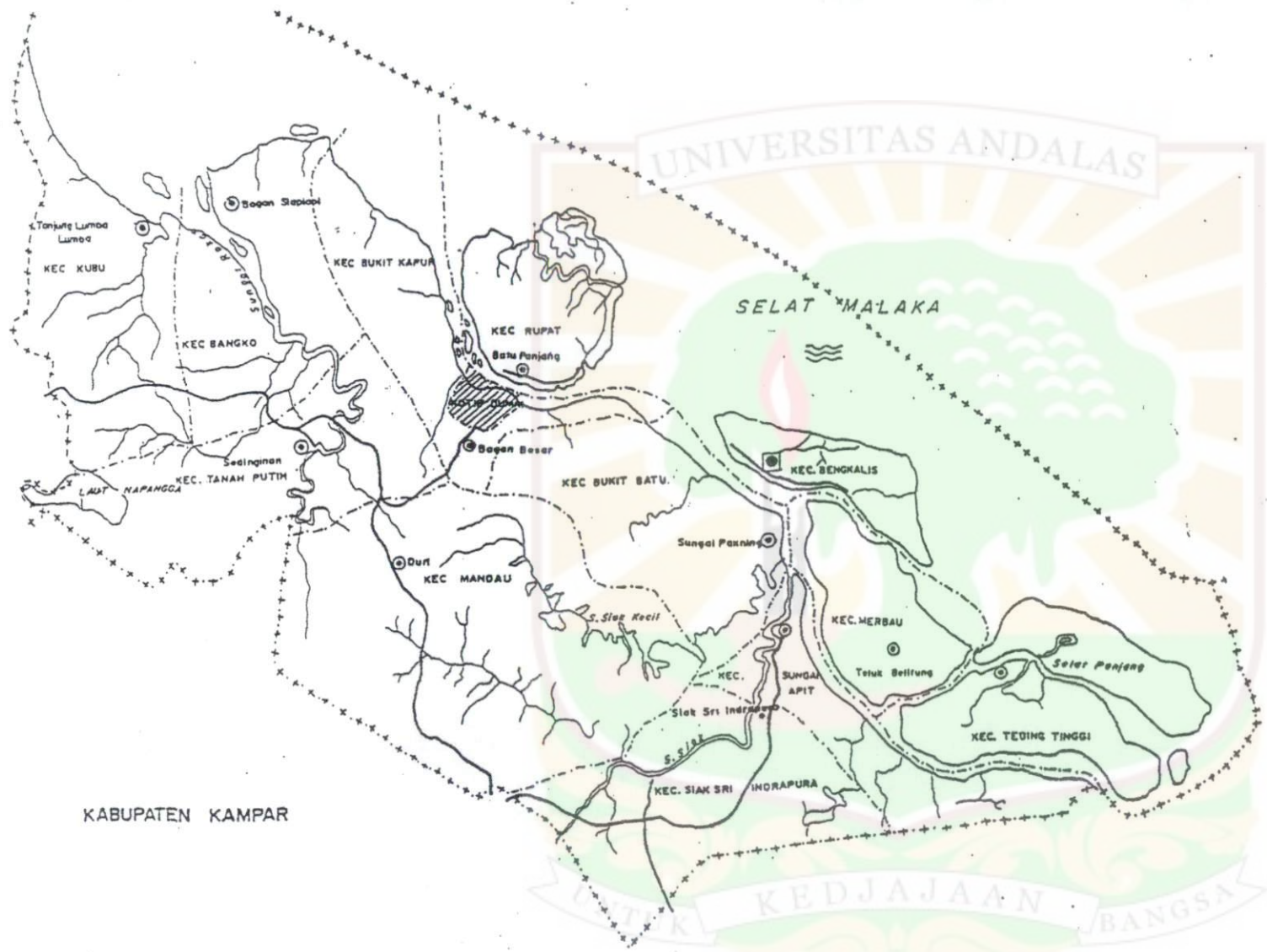
Tanggal	Jml. Lembar	No. Lembar	No. Proyek

Pelaksana : _____

Skala
 0 066 132

KOTA DUMAI





Gambar : 2.01

PETA ORIENTASI KOTA

KETERANGAN

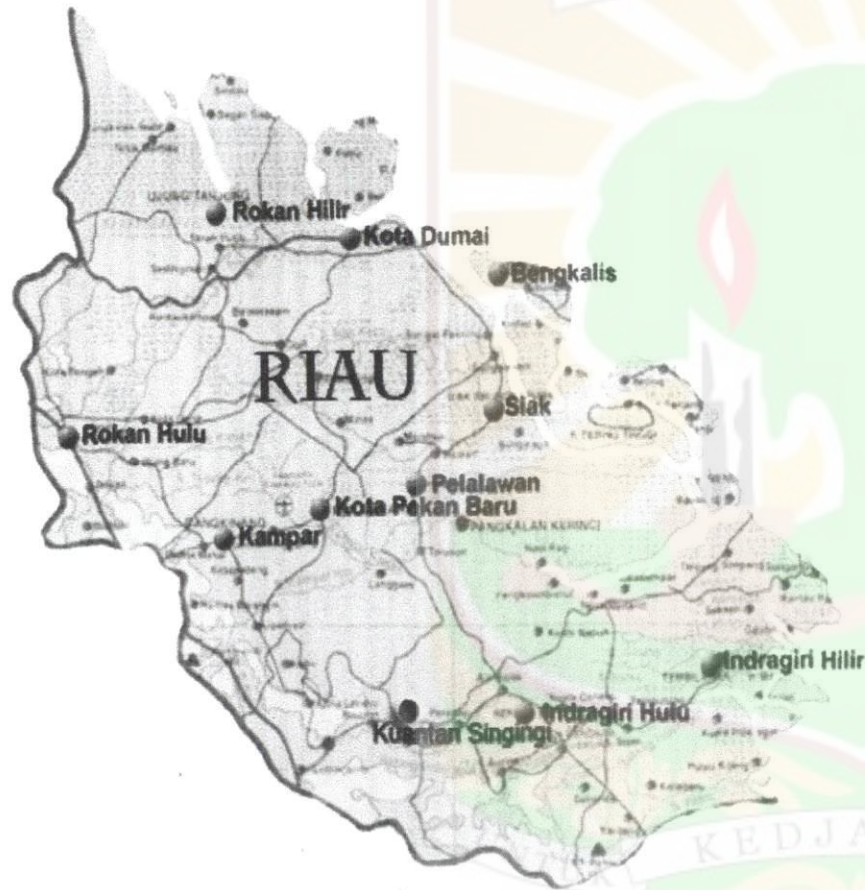
- Batas Negara.
- Batas Kabupaten.
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Jalan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Kota Dumai

Diketahui :			
Diperiksa :			
Digambar : Abdul Rais			
Disetujui :			
Tanggal	Jml. Lembar	No. Lembar	No. Proyek
Pelaksana :			
Skala 1 : 66.500 			

KABUPATEN BENGKALIS

PETA PROVINSI RIAU

Entitas Perwakilan



Sub Auditorat Riau I

Seksi Riau I.A

- * Provinsi Riau
- * Kab. Indragiri Hilir
- * Kab. Pelalawan
- * BUMD & Lembaga Terkalt

Seksi Riau I.B

- * Kab. Indragiri Hulu
- * Kab. Kuantan Singingi
- * Kab. Siak
- * BUMD & Lembaga Terkalt

Sub Auditorat Riau II

Seksi Riau II.A

- * Kab. Bengkalis
- * Kab. Rokan Hulu
- * Kota Dumai
- * BUMD & Lembaga Terkalt

Seksi Riau II.B

- * Kab. Kampar
- * Kab. Rokan Hilir
- * Kota Pekanbaru
- * BUMD & Lembaga Terkalt

Sumber: Pustaka Wilayah Provinsi Riau



Gambar 1: Keadaan Kota Dumai (Dokumen Pribadi)



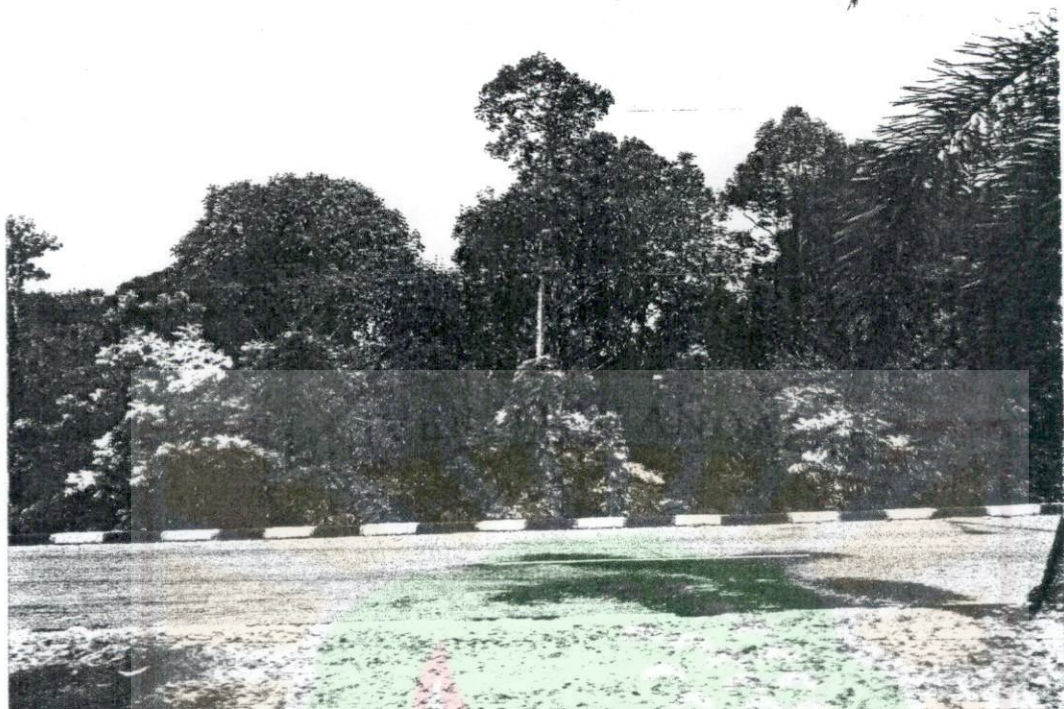
Gambar 2: Keadaan Kota Dumai (Dokumen Pribadi)



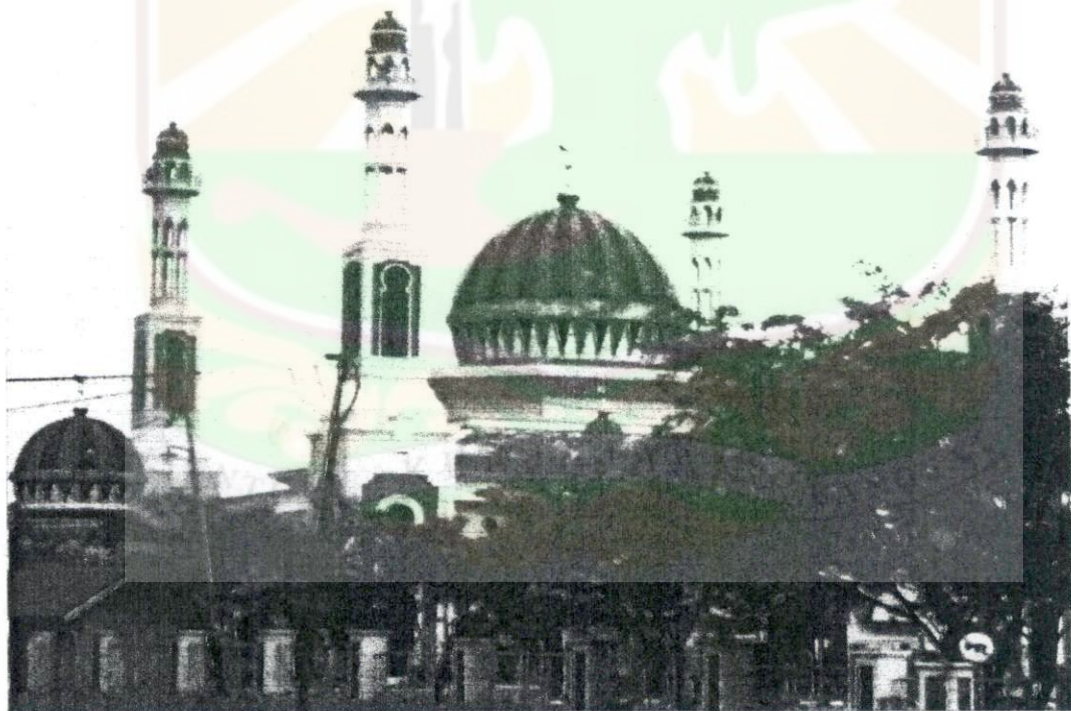
Gambar 3: Hotel Comford Dumai (Dokumen Pribadi)



Gambar 4: Hotel City Dumai (Dokumen Pribadi)



Gambar 5: Hutan Wisata Kota Dumai (Dokumen Pribadi)



Gambar 6: Mesjid Raya Dumai (Dokumen Pribadi)



Gambar 7: Bandara Udara Pinang Kampai Kota Dumai (Dokumen Pribadi)



Gambar 8: Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Kota Dumai (Dokumen BAPPEKO Dumai)



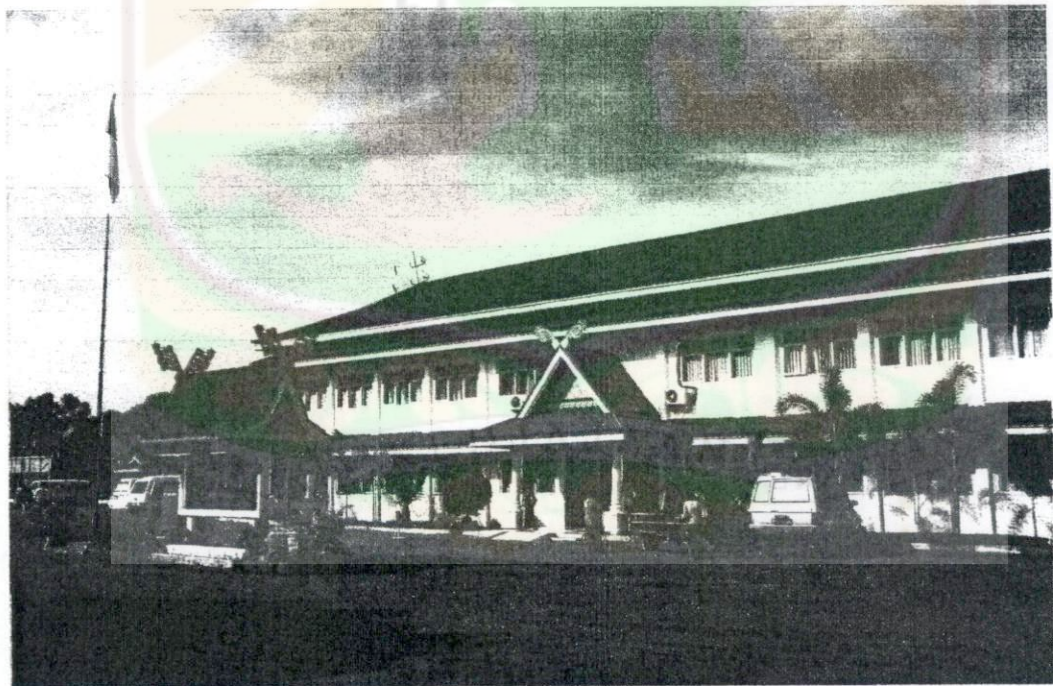
Gambar 9: Terminal Penumpang (Dokumen Pribadi)



Gambar 10: Terminal Barang (Dokumen Pribadi)



Gambar 11: Kantor Walikota Dumai yang baru di Kelurahan Bukit Kapur
(Dokumen BAPPEKO Dumai)



Gambar 12: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (Dokumen Pribadi)



Gambar 13: Kapal Penumpang (Dokumen BAPPEKO Dumai)



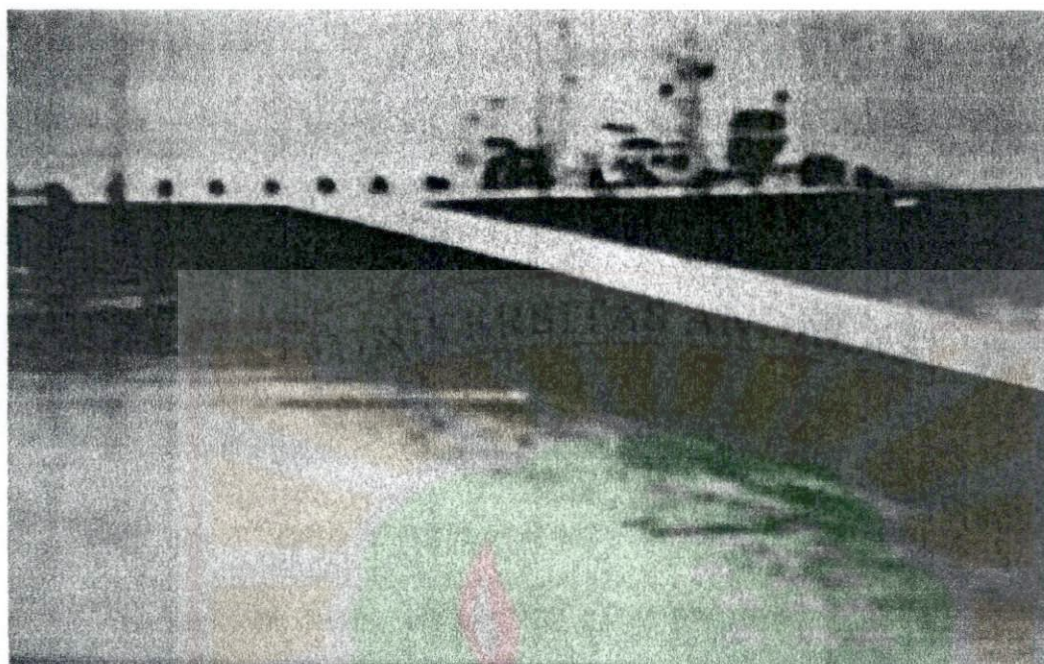
Gambar 14: Masuknya Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Dokumen BAPPEKO Dumai)



Gambar 15: Danau Bunga Tujuh Kota Dumai Dilihat dari Luar (Dokumen Pribadi)



Gambar 16: Danau Bunga Tujuh Dilihat dari Dalam (Dokumen Pribadi)



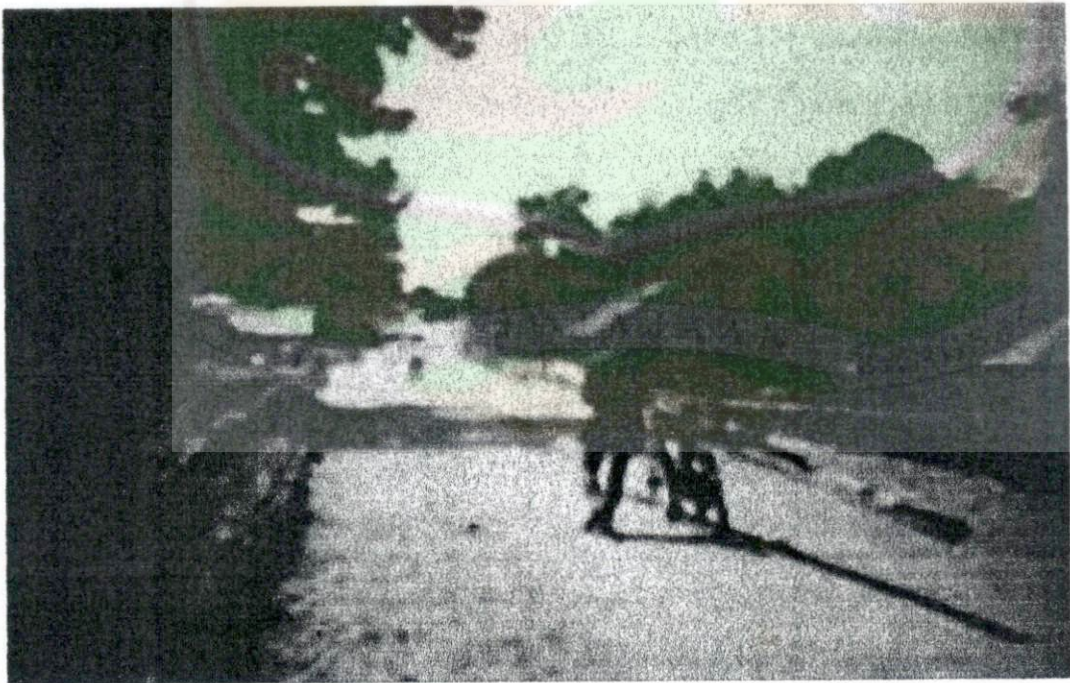
Gambar 17: Pelabuhan Dumai Tahun 1981-1982 (Dokumen BAPPEKO Dumai)



Gambar 18: Pelabuhan Dumai Tahun 1981-1982 (Dokumen BAPPEKO Dumai)



Gambar 19: Jalan Sukajadi Kota Dumai Tahun 1987 (Dokumen BAPPEKO Dumai)



Gambar 20: Desa Nelayan Dumai Tahun 1956 (Dokumen BAPPEKO Dumai)



Gambar 21: Jalan Sultan Syarif Kasim Tahun 1970-an (Dokumen BAPPEKO Dumai)



Gambar 22: Jalan Sultan Syarif Kasim Tahun 1970-an (Dokumen BAPPEKO Dumai)



Gambar 23: Pembuatan Jalan Baru Dari Duri ke Dumai (Dokumen PT. CPI Kota Dumai)



Gambar 24: Jalan Dumai – Duri Tahun 1958



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 13, 1979

PEMERINTAH DAERAH. Kabupaten/Daerah
Tingkat II/Kota Administratif. Dumai. Pembentukan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1979 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP DUMAI

Presiden Republik Indonesia,

menimbang :

bahwa berhubung dengan terdapatnya perkembangan dan kemajuan pada wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau umumnya dan wilayah Kecamatan Dumai khususnya, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin pemenuhan kebutuhan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Dumai;

bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Dumai telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;

bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pembentukan Kota Administratif Dumai perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

at :

5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten
Tingkat II Bengkalis (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

an :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974;

Administratip adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

Dumai adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Riau tanggal 27 Juli 1960 No. 071/3/60
Pembagian Daerah Administrasi Tingkat Kawedanan dan Tingkat
Desa.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Kota Administratip Dumai adalah untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan ber-
manfaat merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta meru-
pakan pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Kota Administratip Dumai bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis.
- (2) Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratip Dumai sebagai Kota Pelabuhan Samudra, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Dumai.

Pasal 4

- Kota Administratip Dumai menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
 - b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
 - c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis pada khususnya.

Pasal 5

- 1) Wilayah Kota Administratip Dumai meliputi sebagian wilayah Kecamatan Dumai, yang terdiri dari :
 - a. Desa Dumai yang lama yang selanjutnya dimekarkan menjadi 6 (enam) desa yaitu :
 1. Desa Dumai Kota
 2. Desa Sukajadi
 3. Desa Teluk Binjai
 4. Desa Buluh Kasap
 5. Desa Laksamana
 6. Desa Rimba Sekampung;
 - b. Desa Tanjung Palas yang lama selanjutnya dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu :
 1. Desa Tanjung Palas
 2. Desa Jaya Mukti;
 - c. Desa Pangkalan Sesai yang lama yang selanjutnya dimekarkan menjadi 4 (empat) desa yaitu :
 1. Desa Pangkalan Sesai

2. Desa Bukit Datuk
3. Desa Purnama
4. Desa Bukit Timah.

Kecamatan Dumai dihapuskan dan :

Sisa wilayah bekas Kecamatan Dumai setelah dikurangi dengan 3 (tiga) desa tersebut pada ayat (1), terdiri dari :

1. Desa Pelintung
2. Desa Guntung
3. Desa Teluk Makmur
4. Desa Bagan Besar
5. Desa Lubuk Gaung
6. Desa Basilan Baru
7. Desa Batu Teritip;

Desa Bagan Besar tersebut pada huruf a Nomor 4 dirnekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu :

1. Desa Bagan Besar
2. Desa Bukit Kapur;

digabungkan dan dibentuk menjadi Kecamatan baru di dalam lingkungan Kabupaten Bengkalis dengan nama Kecamatan Bukit Kapur, berkedudukan di Desa Bukit Kapur.

Pasal 6

Wujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka, Kota Administratif Dumai terbagi atas 2 (dua) Kecamatan yakni :

Kecamatan Dumai Barat, terdiri dari :

1. Laksamana
2. Rimba Sekampung
3. Pangkalan Sesai
4. Bukit Datuk
5. Purnama
6. Bukit Timah;

Kecamatan Dumai Timur, terdiri dari :

1. Dumai Kota
2. Sukajadi
3. Teluk Binjai
4. Suluh Kasap
5. Tanjung Palas
6. Maya Mukti.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kota Administratif Dumai berkedudukan di Kota Dumai.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat berkedudukan di Desa Purnama.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumai Timur berkedudukan di Desa Tanjung Palas.

Pasal 8

Perencanaan Struktur organisasi Pemerintahan Kota Administratif Dumai ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan keadaan dan kondisi serta situasi Kota yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Dumai yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Pokok Struktur Organisasi Pemerintah Wilayah Kota Administratif Dumai.

Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Dumai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Dumai.

Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Dumai sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Nomor 071/3/60, Tahun 1960 dihapuskan.
- (2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, selain diatur sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1999

TENTANG
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis pada umumnya serta Kota Administratif Dumai pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa Kota Administratif Dumai dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
 - c. bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
 - d. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Dumai dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;

dengan Undang-undang;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Kota Administratif Dumai adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai.
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Propinsi Daerah Tingkat I Riau adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai meliputi wilayah :

- 1) Kecamatan Dumai Timur;
- 2) Kecamatan Dumai Barat;
- b. Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yaitu Kecamatan Bukit Kapur.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, Kota Administratif Dumai dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dihapus.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupat;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 3, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dengan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.

BAB III PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, dinas-dinas Daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 11

- a. Pemerintahan Umum;
- b. Kesehatan;
- c. Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Sosial;
- g. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Keuangan Daerah;
- i. Lingkungan Hidup;
- j. Tenaga Kerja;
- k. Pertanian Tanaman Pangan;
- l. Perikanan;
- m. Peternakan;
- n. Perkebunan;
- o. Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Pertambangan;
- q. Pariwisata.

- (2) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Dumai untuk pertamakalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 13

Tingkat II Dumai terdiri dari :

- a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di daerah tersebut.
 - b. Anggota ABRI yang diangkat.
- (2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai:
- a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
 - b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
 - d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
 - e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak

Pasal 15

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
- (3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau wajib membantu pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal peresmiannya.

Pasal 16

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 50

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI

I. UMUM

Kota Administratif Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 yang meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Timur telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan Kota Administratif Dumai saat ini tidak terlepas dari perkembangan kegiatan pelabuhan dimana kota Dumai merupakan pelabuhan samudera terbesar yang terletak di pesisir pantai timur Sumatera di Propinsi Daerah Tingkat I Riau yang padat dengan kegiatan perdagangan/industri serta merupakan pelabuhan ekspor minyak mentah dan minyak hasil olahan kilang Perusahaan Negara Pertamina maupun minyak kelapa sawit.

Di samping itu Kota Administratif Dumai secara geografis mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan Kota Administratif yang ada di Indonesia lainnya karena Kota Dumai berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang terpisah oleh laut dengan jarak ± 60 mil laut dari Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Di samping itu mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan karena terletak pada jalur darat yang menghubungkan berbagai kota di wilayah Propinsi Riau, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

Perkembangan Kota Administratif Dumai tersebut diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1990 penduduk berjumlah 92.788 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 118.282 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2,8% per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, dan sesuai aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 08/KPTS/DPRD/1998 tentang Persetujuan Melepaskan Sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Untuk Dimasukkan Kedalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai tanggal 16 Desember 1998 dan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 01/KPTS/DPRD/1999 tentang Pendapat dan Dukungan Dewan Terhadap Usul Perubahan/Peningkatan Status Kota Administratif Dumai Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai tanggal 14 Januari 1999, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II baru sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan di Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Dalam rangka pengembangan fungsi Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai sesuai dengan potensinya dan guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang khususnya untuk sarana dan prasarana fisik kota, serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, penduduk yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai tidak hanya terdiri dari wilayah Kota Administratif Dumai, tetapi juga meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yaitu Kecamatan Bukit Kapur.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, Kota Administratif Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 dihapus. Dengan demikian Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis wilayahnya berkurang seluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai berasal dari wilayah Kota Administratif Dumai yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis lainnya, yaitu wilayah Kecamatan Bukit Kapur.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.

Ayat (3)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka mengembangkan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai sesuai dengan potensi Daerah dan guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan perlu

adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Penata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pembentukan dinas-dinas Daerah dan instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam Ayat ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Otonom, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan, dan masa depan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah.

Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk pertama kali Penjabat Walikotamadya Daerah Tingkat II Dumai diangkat dan ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau sampai dengan dilantikannya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir ialah pada prinsipnya penetapan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut, berpedoman kepada perimbangan suara hasil Pemilihan Umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara, Pengangkatan, dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas oleh Kota Administratif Dumai.

Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.